

**PENGARUH KUALITAS AUDIT, PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN,
KOMITE AUDIT, RESIKO PERUSAHAAN DAN *INTERNATIONAL*
OPERATION TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN *INDUSTRY TYPE*
SEBAGAI VARIABEL CONTROL**



Diajukan oleh:

Luthfi Khairuna Putra Asmara

15919050

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2018

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018, Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Program Studi Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

LUTHFI KHAIRUNA PUTRA ASMARA

No. MHS. : 15919050

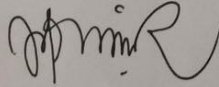
Konsentrasi : Perpajakan

Dengan Judul:

**PENGARUH KUALITAS AUDIT, PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN,
KOMITE AUDIT, RESIKO PERUSAHAAN DAN *INTERNATIONAL OPERATION*
TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN *INDUSTRY TYPE* SEBAGAI
VARIABEL CONTROL**

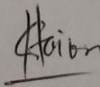
Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D.

Penguji II

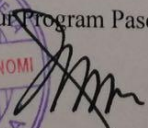


Ayu Chairina Laksmi, SE., MAC., M.Res., Ak., Ph.D.

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana




Dr. Zainal Mustafa EQ., MM.

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, _____

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Johan Arifin', is written over the printed name.

Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D.

**PENGARUH KUALITAS AUDIT, PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN,
KOMITE AUDIT, RESIKO PERUSAHAAN DAN *INTERNATIONAL*
OPERATION TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN *INDUSTRY TYPE*
SEBAGAI VARIABEL CONTROL**

THESIS

Disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Magister (S2)

Di Program Pascasarjana Akuntansi

Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Luthfi Khairuna Putra Asmara

15919050

Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta
2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar master di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup meneima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 20 Juli 2018



Penyusun

(Luthfi Khairuna Putra Asmara)

**PENGARUH KUALITAS AUDIT, PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN,
KOMITE AUDIT, RESIKO PERUSAHAAN DAN *INTERNATIONAL*
OPERATION TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN *INDUSTRY TYPE*
SEBAGAI VARIABEL CONTROL**

Diajukan Oleh:

Luthfi Khairuna Putra Asmara
15919050

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 20 Juli 2018

Dosen Pembimbing

Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

Terimakasih ya ALLAH

“WA MAN JAAHADA FA-INNAMAA YUJAAHIDU LINAFSIHI.”

“BARANGSIAPA BERSUNGGUH-SUNGGUH, SESUNGGUHNYA
KESUNGGUHANNYA ITU ADALAH UNTUK DIRINYA SENDIRI.”
(QS AL-ANKABUT [29]: 6)

**“Do whatever you like, be consistent, and success will come
naturally.”**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan thesis dengan judul “**PENGARUH KUALITAS AUDIT, PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, RISIKO PERUSAHAAN DAN *INTERNATIONAL OPERATION* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN *INDUSTRY TYPE* SEBAGAI *VARIABEL CONTROL*””. Thesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Pascasarjana (S2) pada program studi Magister Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.**

Dalam proses penyusunannya segala hambatan yang ada dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan, dorongan dan pengarahan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. My Lord, Allah SWT. terimakasih telah di berikan kemudahan, lika-liku dan kejutan-kejutan dalam hidup ini. Terimakasih atas berkah dan rezeki yang diberikan selama ini. Alhamdulillah.
2. Orang tua saya, Ibu (Sri Mulyati) dan ayah (Andri Asmara). Terimakasih atas segala doa, semangat, motivasi, inspirasi yang di berikan sampai akhirnya thesis ini selesai. Terimakasih juga atas cinta kasih dan materi yang di investasikan hingga anakmu ini meraih gelar master (S2). I LOVE YOU!
Keluarga besarku, adek, om, tante, cousin-cousin. Terimakasih terus memberikan dorongan semangat dan nasehat-nasehatnya.
3. Keluarga kecilku, Istriku nan cantik dan baik hati (Ana Estu Rakhmawati Alkautsir) dan anakku yang lucu dan selalu menyenangkan hatiku (Rasyaa Abrisam Khairuna). Terimakasih atas pengertiannya, sabar menemani waktu susah, waktu senang dan di setiap waktuku. Terimakasih selalu menjadi inspirasi, semangat, obat disaat lelah dan bosan dan selalu melengkapi serta memberi warna untuk hari-hariku. **t'estimo!**

4. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku dosen pembimbing. Terimakasih telah sabar dan senantiasa membimbing saya hingga thesis saya selesai.
5. CLUTCH - Yona, Tejo, Ridwan, Hita, Rian, Surya. Terimakasih untuk refreshingnya. Dari basket kita kenal, dari basket kita senang, dari basket kita saudara. *We Love This Game!*
6. Dan terimakasih buat semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu-satu di sini. Terimakasih telah memberikan pengalaman dalam perjalanan hidupku sampai sekarang.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi agresifitas perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* pada perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini *tax avoidance* diproksikan dengan *cash effective tax rate*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: kualitas audit, proporsi komisaris independen, jumlah komite audit, risiko perusahaan dan *international operation* dengan *industry type* sebagai variabel control. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 106 perusahaan yang listing di BEI tahun 2014-2016 dan mengungkapkan semua informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variable kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap *cash effective tax rate* sedangkan risiko perusahaan dan *international operation* berpengaruh negatif signifikan terhadap *cash effective tax rate*. Dari hasil tersebut dapat digunakan sebagai masukan bagi regulator dalam membuat peraturan baru atau merevisi peraturan yang sudah berjalan yang terkait dengan perpajakan di Indonesia.

ABSTRACT

This study aims to examine the factors that affect the aggressiveness of companies in tax avoidance on companies listing in Indonesia Stock Exchange. In this study tax avoidance is proxied by cash effective tax rate. The variables used in this study are: audit quality, proportion of independent commissioners, number of audit committee, corporate risk and international operation with industry type as control variable. The sample in this study consists of 106 companies listed on the BEI 2014-2016 and disclose all the information needed by researchers. The results of regression analysis show that audit quality variable have significant positive effect on cash effective tax rate while corporate and international operational risk have significant negative effect on cash effective tax rate. Hopefully these results can be used as input by the regulators preparing the new regulation or revising the existing regulation related to the taxation in Indonesia.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Halaman Moto.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi.....	ix
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
Bab II Tinjauan Pustaka.....	10
2.1 <i>Agency Theory</i>	10
2.2 <i>Tax Avoidance</i>	12
2.3 <i>Corporate Governance</i>	14
2.3.1 Kualitas Audit.....	18
2.3.2 Proporsi Komisaris Independen.....	19
2.3.3 Komite Audit.....	20
2.4 Teori Risiko.....	21

2.4.1 Risiko Perusahaan.....	22
2.4.1 <i>International Operation</i>	23
2.5 Penelitian Terdhulu.....	26
2.6 Pengembangan Hipotesis.....	31
2.6.1 Kualitas Audit Terhadap <i>Cash Effective Tax</i> <i>Rate</i>	31
2.6.2 Proporsi Komisaris Independen Terhadap <i>Cash Effective Tax</i> <i>Rate</i>	32
2.6.3 Komite Audit Terhadap <i>Cash Effective Tax</i> <i>Rate</i>	34
2.6.4 Risiko Perusahaan Terhadap <i>Cash Effective Tax</i> <i>Rate</i>	35
2.6.5 <i>International Operation</i> Terhadap <i>Cash Effective Tax</i> <i>Rate</i>	37
2.7 Kerangka Pemikiran.....	38
Bab III Metode Penelitian.....	39
3.1 Obyek Penelitian.....	39
3.2 Variabel Penelitian.....	39
3.2.1 Variabel Dependent.....	40
3.2.2 Variabel Independent.....	41
3.2.3 Variabel Kontrol.....	44
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	45

3.4 Metode Analisis Data.....	45
3.4.1 Statistik Diskriptif.....	45
3.4.2 Uji Asumsi Klasik.....	45
3.4.2.1 Uji Normalitas.....	46
3.4.2.2 Uji Heteroskedastisitas.....	47
3.4.2.3 Uji Multikolonieritas.....	47
3.4.3 Regresi Berganda.....	47
3.4.4 Koefisien Determinasi.....	48
3.4.5 Uji Signifikansi Parameter Individu.....	49
Bab IV Analisis Data dan Pembahasan.....	51
4.1 Deskripsi Hasil Penelitian.....	51
4.1.1 Analisis Data Statistik Diskriptif.....	52
4.1.2 Analisis Uji Normalitas.....	54
4.1.3 Analisis Uji Heteroskedastisitas.....	56
4.1.4 Analisis Multikolonieritas.....	57
4.1.5 Analisis Regresi Berganda.....	59
4.1.6 Analisis Koefisien Determinasi.....	60
4.1.7 Analisis Uji Signifikansi Parameter Individu.....	61
Bab V Penutup.....	70
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	71
5.3 Saran.....	72

Daftar Pustaka.....	73
Lampiran.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerimaan negara melalui sektor pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar. Menurut data tahun 2012-2016 sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari penerimaan pajak rata-rata terus mengalami peningkatan, yaitu berturut-turut sebesar 73%; 75%; 74%; 82% dan 86% berasal dari kontribusi penerimaan pajak dan sisanya berasal dari kontribusi non-pajak dan hibah (sumber: BPS, 20 November 2017). Data dan fakta yang ditemukan di lapangan selama tahun 2012-2016 menunjukkan tidak adanya hubungan yang linier antara peran penting pajak dan penerimaan pajak. Bahkan realisasi penerimaan pajak tidak pernah memenuhi target yang ditetapkan (sumber: BPS, 20 November 2017). Ketidaklinieran tersebut merupakan efek dari perbedaan sudut pandang antara pemerintah dan perusahaan sebagai wajib pajak.

Perusahaan dalam menjalankan roda bisnis sasaran utamanya adalah memaksimalkan laba dan meminimalkan beban. Salah satu beban yang dihindari perusahaan adalah membayar beban pajak (Butje dan Tjondro, 2014). Hal tersebut membuat pemerintah semakin gencar menekan wajib pajak. Segala macam upaya dilakukan pemerintah untuk memungut pajak dari wajib pajak, mulai dari tax amnesty hingga pembuatan UU nomor 1 tahun 2017 tentang perpajakan, tetapi tidak membuahkan hasil yang signifikan untuk penerimaan pajak negara. Situasi seperti ini

menunjukkan adanya indikasi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh wajib pajak baik secara legal maupun ilegal.

Praktik *tax avoidance* di Indonesia sebenarnya cukup banyak, berdasarkan data pada tahun 2005 menyebutkan realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) atau perusahaan multinasional mencapai USD 8.68 miliar atau meningkat dua kali lipat dari tahun 2004, namun demikian penerimaan dari pajak PMA tidak sebanding dengan peningkatan jumlah investasi PMA (Rusidy, 2013).

Tax avoidance dapat diprosikan dengan *cash effective tax rate* (CETR) (Dyrenge et al., 2008). *Tax avoidance* sendiri terjadi saat individu (wajib pajak) mengurangi pembayaran hutang pajaknya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku (Rusydi, 2013). Latar belakang wajib pajak (dalam hal ini wajib pajak badan atau perusahaan) melakukan *tax avoidance* adalah untuk memperbesar keuntungan yang diharapkan oleh pemegang saham yang eksekutornya adalah manajer perusahaan. Praktek penghindaran pajak membuka peluang bagi manajemen untuk berlaku oportunistik untuk tujuan keuntungan jangka pendek perusahaan, yang kemungkinan akan menimbulkan kerugian dalam jangka panjang, hal ini sejalan dengan teori keagenan. Dalam hal ini *corporate governance* berperan penting dalam mengendalikan permasalahan agensi tersebut, khususnya dalam konteks praktik *tax avoidance* didalam perusahaan (Desai dan Dharmapala, 2006).

Corporate governance merupakan variabel penting yang menjelaskan variasi *tax avoidance* (James dan Igbeng, 2014). Namun hasil penelitian terdahulu belum mendapatkan kesimpulan yang konsisten. Beberapa penelitian terdahulu menemukan

variabel *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Permana dan Zulaikha, 2015; Khoala, 2013; Sabli dan Noor, 2012), sementara para peneliti lain menemukan bahwa *corporate governance* memiliki dampak yang negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* (Desai dan Dharmapala, 2006; Sandy dan Lukviarman, 2015; James dan Igbeng, 2014). Dalam penelitian ini peneliti memodifikasi model penelitian menggunakan unsur-unsur dari *corporate governance* dan memasukan risiko berdasarkan teori agensi dan teori risiko. Unsur-unsur dari *corporate governance* dan resiko yang diperhitungkan diantaranya: Kualitas Audit, Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Risiko Perusahaan dan *International Operation*.

Dalam penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* kualitas audit dengan pengungkapan yang akurat menjadi salah satu elemen yang penting guna mengontrol terjadinya *tax avoidance*. Kualitas audit yang tinggi akan diberikan oleh auditor yang memiliki kualitas dan pemahaman yang baik serta independensi yang tinggi (Sandy dan Lukviarman, 2015). Kualitas audit merupakan salah satu faktor eksternal untuk pengawasan terhadap perusahaan. selain dari eksternal perusahaan juga memiliki unsur pengawasan perusahaan dari dalam salah satu caranya dengan penunjukan komisaris independen.

Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010, untuk memenuhi kaidah *corporate governance* persentase jumlah komisaris independen minimal 30% dari total seluruh anggota komisaris. Dapat dikatakan bahwa komisaris independen mempresentasikan kepentingan pemegang saham

minoritas atau pemegang saham publik. Pemegang saham publik cenderung mentaati aturan-aturan perpajakan yang berlaku, karena mengharapkan perusahaan berperan serta dalam pembangunan bagi masyarakat (Pohan, 2008). Disamping komisaris independen perusahaan juga wajib menetapkan dan membentuk komite audit, guna mengontrol dan mengendalikan jalannya operasional perusahaan.

Komite audit adalah sekelompok orang yang ketuanya dipilih dari anggota dewan komisaris yang memiliki tanggung jawab dari pengawasan proses pengungkapan dan pelaporan keuangan (Desai dan Dharmapala, 2009). Fungsi komite audit yang berjalan secara efektif memungkinkan pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik serta mendukung *corporate governance* (Pohan, 2008).

Sebaik-baiknya perusahaan dalam menerapkan *corporate governance* pasti akan selalu ada risiko - risiko yang muncul dalam perusahaan. Risiko Perusahaan adalah suatu kondisi dimana kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan kinerja suatu perusahaan menjadi lebih rendah daripada apa yang diharapkan suatu perusahaan, karena adanya suatu kondisi tertentu yang tidak pasti dimasa mendatang. Risiko perusahaan merupakan cermin dari policy yang diambil oleh eksekutif perusahaan (Permana dan Zulaikha, 2015). Policy yang diambil eksekutif perusahaan bisa mengindikasikan apakah eksekutif tersebut memiliki karakter *risk taking* atau *risk averse*. Semakin tinggi risiko perusahaan maka eksekutif semakin memiliki karakter *risk taker*, demikian juga semakin rendah risiko perusahaan maka eksekutif akan cenderung memiliki karakter *risk averse* (Damayanti dan Susanto, 2015).

Terlebih lagi eksekutif yang memimpin perusahaan multinasional, akan semakin banyak strategi dan *tool* untuk melakukan *tax avoidance* (Adeseye, 2014)

Strategi bisnis merupakan salah satu hal yang penting terutama bagi perusahaan multinasional. yang kegiatan bisnisnya lebih kompleks. Kegiatan bisnis dari perusahaan multinasional meliputi *national operation* dan *international operation* (Adeseye, 2014). *International operation* adalah kegiatan antar negara yang dilakukan oleh perusahaan multinasional baik dengan entitas cabangnya maupun entitas lain (Permatasari, 2004). Hubungan perdagangan internasional yang semakin terbuka luas dan semakin ekstensif saat ini, menyebabkan pula semakin diperlukannya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur masalah *Internasional Operation*. Bersamaan dengan peningkatan beberapa tarif pajak di beberapa negara, terdapat pula peningkatan cara-cara penghindaran pajak (Permatasari, 2004). Salah satu contohnya perusahaan multinasional dapat menggunakan harga yang menyimpang dari harga yang berlaku umum dalam penentuan harga transfer (*transfer pricing*) antar divisi guna memanipulasi profit perusahaan (Lingga, 2012). Contoh tersebut merupakan salah satu risiko yang dimiliki oleh perusahaan multinasional.

Kebanyakan penelitian empiris tentang hubungan *corporate governance* dan *tax avoidance* dilakukan di negara maju, dan masih sedikit yang dilakukan di negara berkembang seperti Indonesia. Dalam hal ini tujuan penelitian adalah untuk menguji secara empiris pengaruh Kualitas Audit, Proporsi Komisaris Independen, Jumlah Komite Audit, Resiko Perusahaan dan *International Operation* terhadap *Tax*

Avoidance pada perusahaan yang listing di Bursa Effect Indonesia dengan *Industry Type* sebagai variabel control.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah model penelitian yang menggunakan prinsip - prinsip dari *corporate governance* yang berbeda berdasarkan penelitian-penelitian dari Permana dan Zulaikha (2015), Dewi dan Sari (2015), Singly dan Sukartha (2015), Sandy dan Lukviarman (2015), Rusidy (2013), Oktagiani (2015), serta Butje dan Tjondro (2014). Tidak hanya berlandaskan teori agensi tetapi juga memasukan unsur risiko, dalam penelitian ini menggunakan prinsip dari *corporate governance* dan unsur resiko yang berupa: (1)Kualitas Audit, (2)Proporsi Komisaris Independen, (3)Jumlah Komite Audit, (4)Resiko Perusahaan dan (5)*International Operation*. Selain itu adanya variabel kontrol yang berupa *Indusrty Type* menjadikan model penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya.

Populasi dari penelitian ini juga diperluas, tidak hanya mengambil perusahaan manufaktur sebagai sampel tetapi juga dari industry lain berupa industry jasa, pertambangan, investasi dan real estate. Peneliti memperluas cakupan industri yang diteliti karena disetiap industri selalu ada kemungkinan terjadinya *tax avoidance*.

Dapat disimpulkan perbedaan model penelitian ini dengan model penelitian terdahulu antara lain:

- a. Menambahkan proksi Risiko Perusahaan dan *International Operation* sebagai unsur risiko yang dapat terjadi didalam penerapan *Corporate*

Governance, hal ini karena variabel ini cocok digunakan untuk penelitian di negara berkembang seperti Indonesia (Lingga, 2012).

- b. Perluasan populasi yang diteliti, seperti industri keuangan dan perdagangan, Jasa dan investasi, pertanian, pertambangan, industri bahan dasar dan bahan kimia, industri barang-barang konsumsi, properti dan realestate, infrastruktur, dan transportasi.
- c. Penggunaan variabel kontrol yang berupa *Industry Type*, karena populasi yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari bermacam-macam industri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap *Cash Effective Tax Rate*?
2. Apakah Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap *Cash Effective Tax Rate*?
3. Apakah Komite Audit berpengaruh positif terhadap *Cash Effective Tax Rate*?
4. Apakah Resiko Perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Cash Effective Tax Rate*?
5. Apakah *International Operation* berpengaruh negatif terhadap *Cash Effective Tax Rate*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah Kualitas Audit, Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Resiko Perusahaan dan *International Operation* berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidance* yang akan diprosikan dengan *Cash Effective Tax Rate*?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya ilmu akuntansi dan perpajakan. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi sumber refrensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang serupa dalam bidang perpajakan, khususnya *tax avoidance*.

2. Manajemen

Terdapat beberapa manfaat penelitian ini bagi manajemen. Pertama memberikan dorongan kesadaran bagi manajemen untuk lebih transparan dalam melaporkan pajak perusahaan. Kedua, manajemen perusahaan dapat melihat faktor-faktor apa saja dari *corporate governance* dan kemungkinan risiko apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga dapat lebih mengoreksi dan meningkatkan internal perusahaan. Ketiga,

mendorong manajemen untuk berkomitmen meningkatkan *corporate governance* dalam perusahaannya.

3. Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang laporan keuangan tahunan perusahaan, khususnya tentang bagaimana perusahaan mengelola pajaknya ditinjau dari Kualitas Audit, Proporsi Komisaris Independen, jumlah Komite Audit, Resiko Perusahaan dan dari *International Operation* dari sebuah perusahaan. sehingga dapat di jadikan sebagai acuan untuk pembuatan keputusan investasi, serta dapat memberikan aspek pertimbangan baru dalam berinvestasi bagi investor.

4. Pemerintah

Penelitian ini bagi pemerintah melalui kemenkeu atau lembaga pemerintah terkait dapat dijadikan rujukan sebagi bahan pertimbangan dalam membuat peraturan mengenai perpajakan untuk meminimalkan wajib pajak dalam melakukan *tax avoidance*. Kemudian dengan peraturan yang di buat nanti pemerintah dapat melindungi investor dalam berinvestasi pada perusahaan yang listing di BEI.

5. Masyarakat

Memberikan stimulus sebagai pengontrol atas perilaku-perilaku perusahaan dalam pelaporan kewajiban pajaknya terhadap negara. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat atas hak-hak yang harusnya diperoleh dari negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Agency Theory

Teori keagenan dalam perusahaan mengidentifikasi adanya pihak-pihak dalam perusahaan yang memiliki berbagai kepentingan untuk mencapai tujuan dalam kegiatan perusahaan. Teori ini muncul karena adanya hubungan antara prinsipal dan agen. Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri (Anthony dan Govindarajan, 2002). Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka didalam perusahaan. Sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Teori ini berusaha untuk menggambarkan faktor-faktor utama yang sebaiknya dipertimbangkan dalam merancang kontrak insentif (Warsidi dan Pramuka, 2009).

Anthony dan Govindarajan (2002) menyebutkan bila melihat teori agensi maka setiap individu yang terlibat dalam perusahaan akan bertindak atas kepentingannya sendiri-sendiri, mengikuti sifat dasar manusia. Teori agensi memunculkan konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Konflik ini terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Para manajer dalam perusahaan terkadang menyembunyikan informasi yang sebenarnya, termasuk informasi tentang perpajakan dari para pemegang saham untuk

melindungi kepentingannya sendiri sehingga mengganggu kepentingan pemegang saham, karena terjadi asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham. Pemegang saham seharusnya mendapatkan informasi yang sebenarnya. Adanya konflik tersebut mengakibatkan perlunya *check and balance* untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen.

Konflik kepentingan antara agen dan prinsipal mendorong timbulnya biaya keagenan (*agency cost*). Biaya tersebut dapat berupa, pengeluaran untuk mengawasi agen (*monitoring expenditure*), yaitu pengeluaran yang terkait dengan fungsi pemantauan terhadap agen. Bentuk pemantauan yang sering dilakukan antara lain penyusunan laporan keuangan periodik untuk kepentingan pemilik dan adanya fungsi auditing yang bersifat independen dalam menyatakan pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan. Yang berikutnya adalah (*bonding expenditure*), yaitu pengeluaran untuk menjamin bahwa agen akan bertindak sesuai dengan keinginan pemilik, hal ini dapat diterapkan dengan membentuk komite audit serta menunjuk komisaris dan direktur independen sebagai pengawas perusahaan (Warsidi dan Pramuka, 2009).

Hubungan teori agensi dengan penelitian ini adalah praktik *tax avoidance* jika tidak dalam pengelolaan yang baik akan terjadi konflik kepentingan yang diawali dengan adanya asimetri informasi (Sabli dan Noor, 2012). Meminimalisir konflik tersebut maka diperlukan adanya *corporate governance* yang baik, salah satu bentuk *corporate governance* yang baik adalah dengan adanya transparansi informasi (Shafer dan Simons, 2006). Selain itu dalam penerapan *corporate governance* ada risiko murni dan risiko spekulatif yang melekat didalam perusahaan (Sartori, 2010).

2.2 Tax Avoidance

Tax avoidance atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas Negara. *Tax avoidance* selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal. Namun *tax avoidance* ini tidak selalu legal karena pada dasarnya *tax avoidance* dibedakan menjadi dua yaitu penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*) (Budiman dan Setiyono, 2012).

Tax avoidance dapat terjadi didalam undang-undang atau dapat juga terjadi didalam bunyi ketentuan suatu undang-undang itu sendiri, tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undangnya. Biasanya perusahaan melakukan strategi-strategi atau cara-cara yang legal sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, namun dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang sifatnya ambigu dalam undang-undang sehingga dalam hal ini wajib pajak memanfaatkan celah-celah yang ditimbulkan oleh adanya ambiguitas dalam undang-undang perpajakan (Suandy, 2008). Strategi penghematan pajak tersebut disebut juga sebagai suatu strategi pajak yang agresif.

Menurut Shafer dan Simmons (2006) *tax avoidance* adalah suatu skema transaksi yang ditunjukkan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan berbagai kelemahan ketentuan perpajakan suatu Negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar aturan perpajakan. Sedangkan menurut Duff (2009) *tax avoidance* merupakan suatu perencanaan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di negara tertentu dengan

memanfaatkan bagian *grey area* dari peraturan-peraturan tersebut. Pendapat lain mengatakan *tax avoidance* merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan yang dibolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Biasanya *tax avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak yang terkesan tidak melanggar hukum perpajakan (Dyreng et al., 2008).

Beberapa risiko yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan *tax avoidance* antara lain: denda, publisitas dan reputasi (Paligorova, 2010). Sebuah pendekatan teoritis menekankan interaksi dari aktivitas *tax avoidance* dan problem agensi yang merekat pada perusahaan go public (Sartori, 2010). Sekat yang membatasi legal dan ilegalnya suatu tindakan penghematan pajak dalam upaya *tax planning* masih sulit untuk dibedakan, sehingga diharapkan perusahaan lebih baik mematuhi peraturan perpajakan dan tidak memanfaatkan ambiguitas dari peraturan perpajakan untuk kebaikan perusahaan di masa yang akan datang.

Disinilah letak pentingnya *corporate governance*, yaitu sebagai penjamin dilindunginya hak-hak pemegang saham. Dyreng et al (2008) menyatakan bahwa *agency cost* terdiri atas *monitoring cost* dan *bonding cost*. *Corporate governance* dikatakan dapat menurunkan *monitoring cost* dengan adanya peningkatan pengawasan dan transparansi. *Bonding cost* merupakan *agency cost* yang ditanggung oleh direksi yang mencerminkan upaya manajemen dalam menunjukkan kepada pemegang saham bahwa mereka tidak akan menyalahgunakan wewenang yang diberikan (Pohan, 2008).

Karena untuk mengetahui data seberapa besar perusahaan melakukan tax avoidance sangatlah sulit, maka tax avoidance ini dapat diproksikan salah satunya dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) (Dyrenge et al., 2008). CETR bertujuan untuk mengetahui jumlah pajak yang dibayarkan pada tahun berjalan. Jadi **semakin besar nilai CETR** mengindikasikan **semakin kecilnya** perusahaan **melakukan** tax avoidance (Dyrenge et al., 2008). Sebaliknya, jika **semakin rendah nilai CETR** mengindikasikan **semakin tingginya praktik tax avoidance** pada perusahaan tersebut (Budiman dan Setyono, 2012).

2.3 Corporate Governance

Corporate governance (CG) atau tata kelola perusahaan adalah serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) (Hanum, 2013). Pengertian lain dari *corporate governance* (CG) adalah struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya berdasarkan norma, etika, budaya dan aturan yang berlaku (CGPI, 2012). Sedangkan Menurut Cooper et al. (2006) mendefinisikan *corporate governance* terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien dan efektif dalam mengelola

resiko dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan stakeholder. Keputusan-keputusan dari *corporate governance* mempengaruhi hasil kinerja perusahaan termasuk ketika perusahaan mengalami kerugian maupun keuntungan. Perusahaan mengandalkan *corporate governance* sebagai pengawas, karena menurut James dan Igbeng (2014), *corporate governance* merupakan suatu sistem yang mengarahkan dan mengawasi suatu perusahaan.

Menurut definisi dari *Corporate Governance Perception Index* (CGPI, 2012) manfaat *corporate governance* adalah sebagai berikut:

1. Menjaga *sustainability* perusahaan
2. Meningkatkan nilai perusahaan dan tingkat kepercayaan pasar
3. Mengurangi *agency cost* dan *cost of capital*
4. Meningkatkan kinerja, efisiensi dan pelayanan kepada *stakeholders*
5. Melindungi organ dari intervensi politik dan tuntutan hukum
6. Membantu terwujudnya *good corporate citizen*

Dari definisi-definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *corporate governance* didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan untuk mengelola risiko-risiko perusahaan yang signifikan dan meningkatkan investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Prinsip-prinsip *corporate governance* di Indonesia melalui keputusan menteri BUMN nomor Kep-16/MMBU/2012 tentang penerapan *corporate governance* pada

BUMN yang tercantum dalam bab 2 pasal 3 meliputi lima prinsip yaitu sebagai berikut:

1. *Transparancy*

Yaitu keterbukaan mengenai informasi kinerja perusahaan, baik ketepatan waktu maupun akurasi. Hal ini berkaitan dengan kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan. Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. *Accountability*

Yaitu penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian wewenang, peranan, hak dan tanggung jawab dari pemegang saham, investor dan auditor. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. *Responsibility*

Yaitu pertanggungjawaban perusahaan kepada *stakeholder* dan lingkungan dimana perusahaan itu berada. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik)..

4. *Independency*

Yaitu tidak mengusung kepentingan tertentu dan tidak berpihak kepada siapapun. Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. *Fairness*

Yaitu kepastian perlindungan atas hak seluruh pemegang saham dari penipuan (*fraud*) dan penyimpangan lainnya serta adanya pemahaman yang jelas mengenai hubungan berdasarkan kontrak diantara penyedia sumber daya perusahaan dan pelanggan.

Guna memenuhi prinsip-prinsip dalam *corporate governance* tersebut ada beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk mengendalikan dan mengawasi jalannya operasional perusahaan, yaitu diantaranya adalah mendapatkan kualitas audit yang baik, mengangkat komisaris independen yang berkompeten dan profesional dan membentuk komite audit transparan (Annisa dan Kurniasih, 2012).

2.3.1 Kualitas Audit

Menurut Sandy dan Lukviarman (2015) kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan ketidakwajaran dalam penyajian laporan keuangan tersebut, lalu mengungkapkannya dalam laporan auditor independen. Dalam melakukan audit hal yang terpenting adalah menjunjung prinsip *transparency* dan *accountability* yang merupakan bagian dari *corporate governance*. *Transparency* dan *accountability* terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan semua temuan audit termasuk hal-hal terkait perpajakan pada para pemegang saham. Alasannya adalah adanya asumsi bahwa implikasi dari perilaku pajak yang agresif dari pihak eksekutif manajemen, pemegang saham tidak ingin perusahaan mereka mengambil posisi yang agresif dalam hal perpajakan dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya (Sandy dan Lukviarman 2015), karena peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal perpajakan semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori, 2010).

Laporan keuangan memiliki peranan yang penting dan merupakan dasar pengambilan keputusan bagi investor. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor dari KAP *The Big Four* (Price Waterhouse Cooper – PWC, Deloitte Touche Tohamatsu, KPMG, Ernst & Young – E&Y) menurut beberapa referensi cenderung lebih andal dan berkualitas, sehingga mampu menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Oleh karena itu diduga perusahaan yang di audit oleh KAP *The Big Four* memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan

yang diaudit oleh auditor dari KAP non *The Big Four* (Sandy dan Lukviarman, 2015). Sebab auditor dengan integritas dan kemampuan yang tinggi akan mempertahankan reputasinya dengan memberi kualitas audit yang tinggi. Maka semakin berkualitas laporan audit yang dihasilkan akan semakin minim manipulasi laba yang dapat dilakukan oleh perusahaan, sehingga peluang untuk melakukan tax avoidance akan semakin kecil, begitu pula jika hasil audit kurang berkualitas maka akan banyak celah untuk manajemen melakukan manipulasi-manipulasi pada laporan keuangan perusahaan. Sehingga prinsip-prinsip *corporate governance* yang ingin dicapai oleh perusahaan tidak dapat terimplementasi dengan baik (Prakosa, 2014).

2.3.2 Komisaris Independen

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas mengawasi secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberi nasehat pada direksi (UU PT No. 40 Tahun 2007). Komisaris independen adalah bagian dari dewan komisaris yang tidak memegang jabatan di dalam perusahaan. Komisaris independen merupakan bagian yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham, dengan direksi, atau dewan komisaris. Komisaris independen juga tidak menjabat sebagai direktur perusahaan (Pohan, 2008). Selain itu Komisaris Independen dianggap memiliki pengalaman yang berguna bagi perusahaan serta bersikap objektif dan minim dengan *conflict of interest*. Komisaris independen juga memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham (Sandy dan Lukviarman, 2015). Mengacu

pada peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan minimal 30% dari keseluruhan dewan komisaris.

Dari perspektif teori agensi, komisaris independen berperan untuk mengawasi jalannya peran eksekutif yang lain (Solomon 2007). Sehingga eksekutif yang lain tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatannya. Semakin besar Proporsi Komisaris Independen, maka akan dapat meningkatkan kinerja dan keuntungan pemegang saham (Minnick dan Noga 2010).

2.3.3 Komite Audit

Komite Audit memiliki peran penting sebagai salah satu dari komponen didalam perusahaan yang harus ada, guna memenuhi penerapan prinsip *corporate governance*. Sejak direkomendasikan *corporate governance* di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik (Annisa dan Kurniasih, 2012). Komite Audit memiliki tugas untuk melakukan kontrol dalam proses penyusunan keuangan perusahaan dan pengendalian internal perusahaan agar perusahaan terhindar dari kecurangan pihak manajemen. Bursa Efek Indonesia mewajibkan setiap emiten wajib memiliki komite audit yang diketahui oleh komisaris independen.

Menurut peraturan terbaru, POJK 55/2015 dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang disarankan beranggotakan tiga orang anggota, dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit yang beranggotakan sedikit orang cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun memiliki kelemahan yaitu minimnya

pengalaman anggota. Jadi seharusnya anggota komite audit memiliki pemahaman yang memadai dalam pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal (Pohan, 2008). Menurut Pohan (2008) tujuan pembentukan komite audit adalah:

1. Memastikan laporan keuangan yang di keluarkan perusahaan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum;
2. Memastikan internal control yang memadai;
3. Melakukan tindak lanjut terhadap penyimpangan yang material dibidang keuangan dan implikasi hukumnya;
4. Merekomendasikan seleksi auditor eksternal.

2.4 Teori Risiko

Risiko merupakan suatu keadaan adanya ketidakpastian dan tingkat ketidakpastiannya terukur secara kuantitatif. Risiko dapat dikategorikan kedalam risiko murni dan risiko spekulatif. Risiko murni merupakan risiko yang dapat mengakibatkan kerugian pada perusahaan, tapi tidak ada kemungkinan menguntungkan. Sedangkan risiko spekulatif adalah risiko yang dapat mengakibatkan dua kemungkinan, merugikan atau menguntungkan perusahaan (Djohanputro, 2008).

Seluruh kegiatan yang dilakukan baik perorangan atau perusahaan juga mengandung risiko. Kegiatan bisnis sangat erat kaitannya dengan risiko. Risiko dalam kegiatan bisnis juga dikaitkan dengan besarnya pengembalian yang akan didapatkan oleh pengambil risiko. Semakin besar risiko yang dihadapi umumnya

dapat diperhitungkan bahwa pengembalian yang diterima juga akan lebih besar. Pola pengambilan risiko menunjukkan sikap yang berbeda terhadap pengambilan risiko. Risiko adalah ketidakpastian dan dapat menimbulkan terjadinya peluang kerugian terhadap pengambilan keputusan. Ketidakpastian merupakan situasi yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, mendefinisikan risiko sebagai peluang, terjadinya hasil yang tidak diinginkan sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tersebut (Muslich, 2007).

Melakukan *tax planning* khususnya *tax avoidance* tergolong dalam risiko spekulatif. Hal ini digolongkan sebagai risiko spekulatif karena dapat menguntungkan perusahaan jika berjalan lancar dan dapat merugikan perusahaan jika *tax avoidance* yang dilakukan tergolong ilegal (Khoala, 2013).

2.4.1 Risiko Perusahaan

Pengertian Risiko Perusahaan adalah suatu kondisi dimana kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan kinerja suatu perusahaan menjadi lebih rendah daripada apa yang diharapkan suatu perusahaan karena adanya suatu kondisi tertentu yang tidak pasti dimasa mendatang. Risiko perusahaan merupakan salah satu risiko spekulatif dalam penerapan *corporate governance* (Dewi dan Sari, 2015). Semakin tinggi risiko spekulatif dari perusahaan maka akan semakin tinggi pula pengembalian yang akan didapat oleh perusahaan jika spekulasi yang dilakukan berjalan lancar. Risiko perusahaan merupakan cermin dari policy yang diambil oleh pemimpin

perusahaan (Coles et al, 2004). Policy yang diambil pimpinan perusahaan bisa mengindikasikan apakah mereka memiliki karakter pengambil risiko atau menghindari risiko. Semakin tinggi kecenderungan risiko perusahaan maka eksekutif semakin memiliki karakter pengambil risiko, demikian juga sebaliknya, semakin rendah kecenderungan risiko perusahaan maka eksekutif akan memiliki karakter menghindari risiko (Butje dan Tjondro, 2014).

Menurut Paligorova (2010) Risiko Perusahaan dapat diukur menggunakan persamaan standar deviasi dari EBITDA (Erning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) dibagi dengan total asset perusahaan.

2.4.2 *International Operation*

Internatioanal operation adalah aktivitas perusahaan diluar negeri atau kegiatan lintas negara pada suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki *International Operation* biasanya disebut perusahaan multinatioanal. Penerapan *corporate governance* pada perusahaan multinasional mengandung risiko murni dan risiko spekulatif (Lingga, 2012). Perencanaan pajak untuk suatu *International Operation* merupakan pekerjaan yang sangat kompleks (Adeseye, 2014). Untuk operasionalnya di luar negeri kadang perusahaan multinasional harus mendirikan cabang atau perwakilan perusahaan di beberapa Negara, dan harus tunduk terhadap peraturan perpajakan di Negara tersebut. Transaksi – transaksi yang terjadi antar anggota grup perusahaan multinasional itu dapat dikategorikan dalam beberapa

transaksi, seperti penjualan barang dan jasa, lisensi, paten, penjaminan hutang dan sebagainya. Dalam konteks internasional, *tax avoidance* dapat terjadi misalnya pada (Adeseye, 2014):

1. Wajib Pajak yang mengubah status residencinya ke wilayah lain yang pajaknya lebih rendah. Wajib Pajak dapat mengalihkan penghasilannya ke entitas lain, misalnya perusahaan yang didirikan di *tax haven*.
2. Wajib Pajak dapat mengalihkan penghasilannya ke entitas lain, misalnya perusahaan atau mungkin trust yang didirikan di *tax haven*.
3. Wajib pajak dapat mendirikan anak perusahaan di negara lain yang didesain untuk menerima penghasilan dari luar negeri atau untuk menerima pembagian dividen dari perusahaan-perusahaan lain yang dimiliki di Negara lainnya.
4. Wajib Pajak dapat mengatur pembayaran dividen yang diterimanya dari negara lain melalui satu lembaga yang didirikan disuatu negara yang mempunyai *tax treaty* dengan negara asal pembayar dividen. Karena dalam *tax treaty* biasanya tarif *withholding tax* diturunkan, maka dengan adanya *tax treaty* Wajib Pajak dapat mengurangi beban pajaknya.

Karena alasan-alasan inilah biasanya dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan suatu negara tercantum berbagai ketentuan untuk memerangi usaha-usaha *tax avoidance*. Ketentuan anti *avoidance* ini biasanya kemudian disertai dengan pemberian wewenang kepada otoritas pajak untuk merekonstruksi transaksi itu sesuai dengan kondisi pasar dan menghitung pajak terutang berdasarkan transaksi rekonstruksian ini. Contohnya dalam ketentuan *transfer pricing* otoritas suatu Negara

diberikan kekuasaan untuk mengabaikan harga transaksi yang dilaporkan oleh wajib pajak dan menggunakan harga transaksi yang wajar yang dipergunakan dalam transaksi komersial. Ditinjau dari segi kepentingan perusahaan multinasional, dalam rangka mengorganisir transaksi antar unit-unit dalam grupnya, masalah *transfer pricing* merupakan masalah yang harus dipertimbangkan, dengan catatan bahwa penyesuaian harga sebenarnya dengan harga pasaran bebas dalam rangka penentuan penghasilan kena pajak yang wajar (Permatasari, 2004).

Pengertian dari *transfer pricing* menurut Suryana (2012) adalah transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, bisa dengan menaikkan (*mark up*) atau menurunkan harga (*mark down*), kebanyakan dilakukan oleh perusahaan global (*multinational enterprise*) yang mempunyai *International Operation*. Selain itu *transfer pricing* juga didefinisikan sebagai nilai atau harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (*selling division*) dan biaya divisi pembeli (*buying division*). *Transfer pricing* juga disebut dengan *intracompany pricing*, *intercorporate pricing*, *interdivisional* atau *internal pricing* yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota. *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang cocok bagi grupnya. Mereka dapat menyimpang dari harga pasar wajar karena posisi

mereka yang berada dalam keadaan bebas untuk mengadopsi prinsip apapun yang tepat bagi korporasinya. Penyimpangan dari *transfer pricing* dapat dikategorikan sebagai risiko murni perusahaan multinasional (Adeseye, 2014).

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai *tax avoidance* telah menjadi perhatian para peneliti selama sepuluh tahun belakangan ini. Berbagai model yang digunakan dan hasil penelitian yang didapatkan tidak akan membuat para peneliti merasa puas, karena fenomena *tax avoidance* ini (khususnya di Indonesia) akan berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebagian besar didominasi oleh pendapatan dari sektor pajak.

Di bawah ini merupakan rangkuman model, variabel dan hasil penelitian terdahulu tentang *tax avoidance* yang menjadi dasar penulis dalam menentukan pengambilan variabel penelitian serta membuat model penelitian, sebagai berikut:

Tabel I
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Dewi dan Sari (2015)	Pengaruh Insentif, <i>Resiko Perusahaan</i> dan Corporate Governance Pada Tax	<ul style="list-style-type: none"> - Insentif - <i>Resiko Perusahaan</i> - CG 	Regresi linier berganda	<ul style="list-style-type: none"> - Insentif tidak signifikan - <i>Resiko Perusahaan</i> signifikan (-) - CG tidak signifikan

		Avoidance			
2	Swingly dan Sukartha (2015)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth Pada Tax Avoidance	Independen: <ul style="list-style-type: none"> - Karakter Eksekutif - Komite Audit - Ukuran Perusahaan - Leverage - Sales Growth 	Regresi Linier berganda	Independen: <ul style="list-style-type: none"> - Karakter Eksekutif signifikan (+) - Komite Audit tidak signifikan - Ukuran Perusahaan signifikan (+) - Leverage signifikan (-) - Sales Growth tidak signifikan
3	Permana dan Zulaikha(2015)	Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang listing di BEI th 2011-2014	Independen: <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Dewan Komisaris - Presentase Dewan Komisaris Independen - Kompensasi Eksekutif Kontrol: <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Perusahaan - Leverage 	Regresi linier berganda	Independen: <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Dewan Komisaris tidak signifikan - Presentase Dewan Komisaris Independen Tidak signifikan - Kompensasi Eksekutif tidak signifikan Kontrol: <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Perusahaan signifikan (-) - Leverage signifikan (+)
4	Sandy dan Lukviarman (2015)	Pengaruh Corporate Govenance	Corporate Governance <ul style="list-style-type: none"> - Komite Audit 	Regresi linier berganda	<ul style="list-style-type: none"> - Komite Audit signifikan (-) - Kepemilikan

		Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur	<ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan Institusional - Kualitas Audit - Komisaris Independen 		<p>Institusional tidak signifikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kualitas Audit signifikan (-) - Komisaris Independen signifikan (-)
5	Rusidy (2013)	Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresifitas Tax Avoidance	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Perusahaan <p>Kontrol:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leverage - ROA 	Regresi linier berganda	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Perusahaan tidak signifikan <p>Kontrol:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leverage tidak signifikan - ROA signifikan (-)
6	Oktagiani (2015)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ROA - Leverage - Ukuran Perusahaan - Kompensasi Rugi Fiskal 	Regresi linier berganda	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ROA signifikan (-) - Leverage tidak signifikan - Ukuran Perusahaan signifikan (+) - Kompensasi Rugi Fiskal signifikan (+)
7	Butje dan Tjondro (2014)	Pengaruh Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karakter Eksekutif - Koneksi Politik <p>Kontrol:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Perusahaan - Laverage - Pertumbuhan 	Regresi linier berganda	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karakter Eksekutif signifikan (-) - Koneksi Politik signifikan (+) <p>Kontrol:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Perusahaan

			<ul style="list-style-type: none"> - Penjualan Sektor Industri 		<ul style="list-style-type: none"> - tidak signifikan - Lverage signifikan (+) - Pertumbuhan Penjualan signifikan (-) - Sektor Industri signifikan (+)
8	Muideen Adeseye (2014)	Transfer Pricing: A Tax Avoidance Tool of Multinational Corporation	<ul style="list-style-type: none"> - Tax Avoidance - Multinational Company - Transfer Pricing 	Diskriptif	<ul style="list-style-type: none"> - Transfer pricing merupakan alat perusahaan multinasional untuk mengurangi beban pajaknya - Perusahaan multinasional mengambil keuntungan, membuat pajak-pajak anak perusahaan mereka yang berada di yuridis yang mengenakan pajak yang besar dengan transfer pricing, untuk memindahkan laba mereka
9	Khoala (2013)	Does Corporate Governance Affect Tax	<ul style="list-style-type: none"> - Independen: Corporate Social Responsibilit 	Regresi Linier berganda	<ul style="list-style-type: none"> - CSR berpengaruh Signifikan (+) - Kompensasi

		Planning? Evidence From American Companies	y - Kompensasi eksekutif - Prosentase Direktur Independen - Jumlah Direksi Control: - Return On Asset		Eksekutif berpengaruh signifikan (-) - Prosentase Direktur Independen berpengaruh signifikan (-) - Jumlah direksi tidak berpengaruf signifikan - ROA tidak perpengaruh signifikan
--	--	--	---	--	---

2.6 Pengembangan Hipotesis

Dari literature review, teori-teori serta rangkuman penelitian terdahulu di atas, maka peneliti melakukan pengembangan hipotesis sebagai berikut:

2.6.1 Kualitas Audit terhadap Cash Effective Tax Rate

Dalam teori agensi, *corporate governance* merupakan hal yang penting untuk mengendalikan dan memantau masalah keagenan. Salah satu bentuk pemantauan terhadap agen/manajemen yang sering dilakukan adalah menunjuk auditor independen guna mengaudit perusahaan (Warsidi dan Pramuka, 2009). Auditor yang baik dan professional akan menghasilkan kualitas audit yang baik pula. Kualitas audit yang baik merupakan salah satu komponen yang penting dalam memenuhi prinsip *corporate governance*, yaitu untuk memenuhi prinsip *transparancy* dan *accountability* (Sandy dan Lukviarman, 2015). *Transparancy* dan *accountability* terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan semua temuan audit

termasuk hal-hal terkait perpajakan pada para pemangku kepentingan (Permana dan Zulaikha, 2015).

Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor dari KAP *The Big Four* (Price Waterhouse Cooper – PWC, Deloitte Touche Tohamatsu, KPMG, Ernst & Young – E&Y) cenderung lebih andal dan berkualitas, sehingga mampu menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Oleh karena itu perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* cenderung memiliki kualitas laporan audit yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh auditor dari KAP non *The Big Four*. Semakin berkualitas laporan audit yang dihasilkan maka akan semakin minim manipulasi laba yang dapat dilakukan oleh perusahaan, sehingga membuat nilai CETR akan semakin besar. Nilai CETR yang semakin besar mengindikasikan peluang terjadinya tax avoidance semakin kecil, begitu pula sebaliknya jika audit yang dilakukan kurang berkualitas maka akan memperbesar kemungkinan terjadinya tax avoidance, yang diindikasikan dengan nilai CETR yang semakin kecil.

Uraian diatas didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan hubungan positif antara kualitas audit dengan *cash effective tax rate* (Dyreng et al. 2010; Maharani dan Suardana 2014; Sandy dan Lukviarman 2015).

Berdasar uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kualitas audit berpengaruh positif terhadap cash effective tax rate

2.6.2 Proporsi Komisaris Independen terhadap Cash Effective Tax Rate

Pengawasan yang efektif oleh pihak-pihak yang berkaitan dalam pengelolaan perusahaan sangat dibutuhkan. Bagian terpenting yang menjadi dasar dari terlaksananya konsep *corporate governance* adalah dewan komisaris yang terdiri dari komisaris independen. Dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan karena dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja manajemen (Egon, 2000). Pengertian komisaris independen adalah bagian dari dewan komisaris yang tidak memegang jabatan didalam perusahaan. Komisaris independen juga merupakan bagian yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham, direksi, atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur perusahaan. Selain itu komisaris independen dianggap memiliki pengalaman yang berguna bagi perusahaan serta bersikap objektif dan minim dengan *conflict of interest* (Sandy dan Lukviarman, 2015). Dari perspektif teori agensi komisaris independen merupakan komponen yang penting guna memenuhi prinsip dari *corporate governance* (Anthony dan Govindarajan, 2002).

Dilihat dari perspektif teori agensi komisaris independen berperan melakukan check and balance dan mengawasi jalannya peran manajemen dan eksekutif yang lain, termasuk dalam praktik-praktik *tax avoidance*. Jadi semakin banyak proporsi dari komisaris independen dalam sebuah perusahaan, maka akan semakin banyak pengawasan terhadap kinerja manajemen dan keputusan-keputusan perusahaan yang akan diambil, dengan demikian hal ini diharapkan dapat menekan praktik tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan dengan diindikasikan dengan kenaikan

nilai CETR. Sebaliknya, apabila komisaris independen tidak bekerja dan menjalankan fungsinya dengan baik, maka akan semakin besar kemungkinan manajemen dan eksekutif yang lain dapat memanipulasi posisi mereka dengan mendapatkan kontrol yang penuh atas keputusan-keputusan yang akan diambil. Hal ini dapat menurunkan nilai CETR sehingga berimplikasi dengan semakin tinggi dilakukannya praktik *tax avoidance* pada perusahaan tersebut.

Pernyataan tersebut sesuai dengan beberapa penelitian terdahulu yang menemukan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap cash effective tax rate (Setiana dan Setyowati 2014; Maharani dan Suardana 2014; Prakosa 2014).

Berdasar uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap cash effective tax rate

2.6.3 Jumlah Anggota Komite Audit terhadap Cash Effective Tax Rate

Dari perspektif teori keagena, komite audit merupakan salah satu *agency cost*, yaitu *bonding expenditure* yang penting dikeluarkan selain untuk mematuhi peraturan dari BEI juga penting untuk memenuhi prinsip *corporate governance* (Warsidi dan Pramuka, 2009). Pengertian komite audit sendiri adalah bagian dalam sebuah perusahaan yang bertugas mengontrol dan mengawasi kinerja manajemen, baik kinerja keuangan maupun kepatuhan terhadap *Standard Operating Procedure (SOP)* dalam perusahaan (Prakosa, 2014). Komite audit haruslah beranggotakan orang-orang

yang independen, dan dipilih secara independen pula (Sartori, 2010). Komite audit memiliki peran penting sebagai salah satu dari komponen didalam perusahaan yang harus ada, guna penerapan prinsip *corporate governance* dan meminimalisir masalah keagenan. Sejak direkomendasikn *corporate governance* di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan public (peraturan BEI tahun 2000).

Bursa Efek Indonesia menyarankan sedikitnya komite audit beranggotakan tiga orang. Jadi jika kurang dari tiga orang maka tidak sesuai dengan anjuran dari BEI. Dengan demikian, apabila jumlah komite audit dalam suatu perusahaan semakin sedikit dan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh BEI, maka kemungkinan penurunan nilai CETR yang berarti terjadinya tax avoidance yang dilakukan manajemen akan semakin tinggi. Karena adanya ketidak patuhan pada peraturan yang telah ditetapkan oleh BEI menjadikan prinsip-prinsip *corporate governance* tidak berjalan dengan baik dan minimnya pengawasan serta tekanan terhadap manajemen/agen dalam menjalankan perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan patuh terhadap peraturan BEI yang menetapkan komite audit beranggotakan minimal tiga orang, maka memungkinkan peningkatan nilai CETR yang mengindikasikan adanya penurunan dari praktik tax avoidance yang dilakukan manajemen, karena prinsip-prinsip *corporate governance* dijalankan dengan baik.

Beberapa penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa komite audit memiliki pengaruh yang positif terhadap cash effective tax rate (Annisa dan Kurniasih, 2012; Maharani dan Suardana, 2014; Sandy dan Lukviarman, 2015).

Berdasar uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Jumlah Anggota Komite Audit berpengaruh positif terhadap cash effective tax rate

2.6.4 Risiko Perusahaan terhadap Cash Effective Tax Rate

Dalam penerapan *corporate goernance* selalu ada risiko yang mengikuti. Menurut teori risiko salah satu risiko spekulatif yang ada dalam penerapan *corporate governance* adalah risiko perusahaan (Djohanputro, 2008). Risiko ini merupakan salah satu unsur dari *corporate governance* yang berkaitan dengan kualitas informasi dan kebijakan yang dihasilkan oleh eksekutif perusahaan. (Paligorova, 2010). Risiko perusahaan merupakan cermin dari kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan (Coles et al, 2004). Kebijakan yang diambil pimpinan perusahaan bisa mengindikasikan apakah mereka memiliki karakter pengambil risiko atau menghindari risiko.

Semakin tinggi risiko perusahaan maka eksekutif semakin memiliki karakter pengambil risiko, demikian juga semakin rendah risiko perusahaan maka eksekutif akan cenderung memiliki karakter menghindari risiko. Hal ini mengindikasikan semakin tinggi *risiko perusahaan* maka semakin banyak pula kebijakan-kebijakan dari perusahaan yang memungkinkan terjadinya *tax avoidance*, jadi semakin tinggi

risiko perusahaan maka akan semakin rendah nilai CETR yang mengindikasikan semakin tinggi terjadinya *tax avoidance*. begitu pula sebaliknya, semakin rendah risiko perusahaan maka akan semakin tinggi nilai CETR yang mengindikasikan semakin rendahnya *tax avoidance* terjadi.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang menemukan bahwa risiko perusahaan berpengaruh negatif terhadap cash effective tax rate (Butje dan Tjondro 2014; Swingly dan Sukartha 2015; Dewi dan Sari 2015).

Berdasar uraian-uraian tersebut maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut:

H4: Risiko Perusahaan berpengaruh negatif terhadap cash effective tax rate

2.6.5 *International Operation* terhadap Cash Effective Tax Rate

Dalam perspektif teori risiko, *international operation* dapat digolongkan sebagai risiko murni atau risiko spekulatif (Djohanputro, 2008). Tergolong sebagai risiko murni saat *international operation* disalah gunakan, misalnya saat perusahaan menetapkan transfer pricing tidak sesuai dengan harga wajar yang berlaku dipasaran. Dapat menjadi risiko spekulatif saat *international operation* ini dimanfaatkan sebagai strategi manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan (Permatasari, 2004). Menurut Permatasari (2004) definisi dari *international operation sendiri* adalah kegiatan perusahaan baik penjualan maupun pembelian dengan perusahaan asing ataupun perusahaan yang memiliki cabang di luar negeri. *International Operation*

merupakan bagian dari penerapan *corporate governance*, khususnya termasuk kedalam risiko yang dapat timbul dari penerapan prinsip tersebut pada suatu perusahaan, terlebih lagi pada perusahaan multinasional (Dewi dan Jati, 2014). Perusahaan yang mempunyai *international operation* harus bertanggung jawab dengan Negara dimana perusahaan itu berada, tidak terkecuali dalam aturan pembayaran pajak (Adeseye, 2014).

Dalam penerapan *international operation* sangat dimungkinkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan, tidak terkecuali dalam bidang perpajakan. Contohnya *transfer pricing* salah satu metode yang sering digunakan oleh perusahaan multinasional untuk memindahkan atau menggeser laba dari perusahaan yang berada di Negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke perusahaan subsidiary yang berada di Negara yang termasuk kedalam *tax heaven country* atau Negara dengan tarif pajak yang rendah atau bahkan mempunyai tarif pajak nol. Hal tersebut merupakan indikasi dari praktik *tax avoidance*. Jadi adanya *international operation* atau semakin banyak *international operation* dari suatu perusahaan maka akan cenderung meningkatkan risiko terjadinya *tax avoidance* pada perusahaan tersebut, yang berimplikasi dengan penurunan nilai CETR. Demikian pula sebaliknya semakin sedikit *international operation* suatu perusahaan maka akan berpengaruh positif terhadap tingkat CETR suatu perusahaan, yang mengindikasikan bahwa tingkat *tax avoidance* perusahaan semakin rendah.

Pernyataan ini didukung oleh beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang menyebutkan adanya hubungan negatif antara *international operation* dengan cash effective tax rate (Dyrenge et al., 2010; Adesey, 2012; Lingga, 2012).

Berdasar uraian-uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

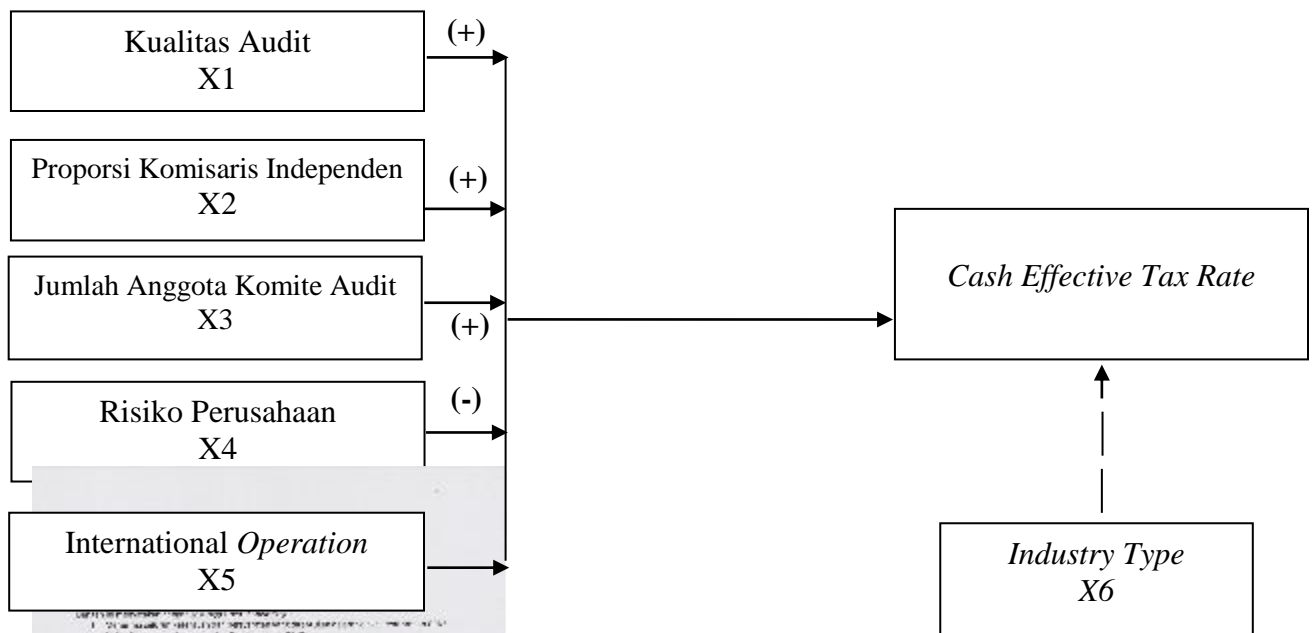
H5: *International Operation* berpengaruh negatif terhadap cash effective tax rate

2.7 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar I

Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

Populasi penelitian ini bersumber dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu semua perusahaan yang listing di BEI selama tahun 2014-2016. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu sampel ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan yang menerbitkan annual report lengkap pada tahun 2014 - 2016.
2. Laporan keuangan dilaporkan dengan mata uang rupiah (Rp).
3. Perusahaan yang selama tahun 2014-2016 tidak pernah mengalami kerugian.
4. Perusahaan yang memiliki data mengenai, Komisaris Independen, jumlah Komite Audit, informasi KAP yang mengaudit perusahaan dan apakah perusahaan tersebut memiliki *International Operation*.

3.2 Variabel Penelitian

Variable penelitian adalah semua keadaan, faktor, kondisi, perlakuan, atau tindakan yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen. Variabel-variabel yang dipilih dan diuji dalam penelitian ini adalah:

3.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau akibat karena adanya akibat variabel independen (Ghozali, 2016). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance* yang diproksikan dengan *Cash Effective Tax Rate (TXA)*. *Tax Avoidance* sendiri adalah suatu skema transaksi yang ditunjukkan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan berbagai kelemahan ketentuan perpajakan suatu Negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar aturan perpajakan (Sandy dan Lukviarman, 2015). Variabel ini diproksikan dengan *Cash Erning Tax Rate (CETR)*. CETR bertujuan untuk mengetahui jumlah pajak yang dibayarkan pada tahun berjalan. CETR tidak terpengaruh oleh perubahan estimasi seperti valuation allowance dan tax cushion (Minick dan Noga , 2010). Nilai cash tax paid dapat dilihat pada laporan arus kas dari aktivitas operasi. **Semakin besar nilai CETR mengindikasikan semakin kecil perusahaan melakukan tax avoidance** (Dyreng et al, 2008). Sebaliknya, jika **semakin kecil nilai CETR mengindikasikan semakin tingginya praktik tax avoidance** pada perusahaan (Budiman dan Setyono, 2012). CETR dapat dihitung dengan menggunakan cara membagi Cash Tax Paid dengan Pretax Income (Dyreng et al, 2008).

$$\text{CETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pretax Income}}$$

Dimana :

- a) CETR adalah effective tax rate berdasarkan kas yang dikeluarkan untuk membayar pajak;
- b) Tax Payment adalah pajak yang di bayarkan perusahaan X pada tahun tersebut berdasarkan laporan keuangan perusahaan;
- c) Pretax Income adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan X pada tahun tersebut berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

3.2.2 Variabel Independen

Variable independen adalah variable yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel-variabel yang dipilih dalam penelitian ini adalah:

1. Kualitas Audit (KAU)

Kualitas audit biasa diukur berdasarkan reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit pada suatu perusahaan. Jika perusahaan diaudit oleh KAP *The Big Four*, maka akan lebih transparan dan profesional dalam mengungkap temuan-temuan audit (Sandy dan Lukviarman, 2015). Untuk mengukur variable ini peneliti menggunakan variabel *dummy*. Perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* yaitu Price Waterhouse Cooper-PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young-E&Y akan diberi nilai 1, dan apabila diaudit diluar dari keempat KAP tersebut akan diberi nilai 0.

2. Proporsi Komisaris Independen (PKI)

Komisaris independen adalah bagian dari dewan komisaris yang tidak memegang jabatan didalam perusahaan. Komisaris independen merupakan bagian yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham dengan direksi atau dewan komisaris dan tidak menjabat direktur perusahaan (Pohan, 2008). Dalam penelitian ini variabel Proporsi Komisaris Independen diproksikan dengan persentase keberadaan Komisaris Independen dalam suatu perusahaan, dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$PKI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

3. Jumlah Anggota Komite Audit (KA)

Komite Audit memiliki tugas untuk melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan dan pengendalian internal perusahaan agar perusahaan terhindar dari kecurangan pihak menejemen (Daniri, 2016). BEI menyarankan sedikitnya komite audit beranggotakan tiga orang. Jadi jika kurang dari tiga orang maka tidak sesuai dengan saran yang dianjurkan oleh BEI. Dalam penelitian ini variabel komite audit dihitung berdasarkan Jumlah anggota komite audit perusahaan tersebut.

4. Risiko Perusahaan (RISK)

Budiman dan Setiyono (2012) menyatakan bahwa Risiko perusahaan mencerminkan penyimpangan atau deviasi standar dari *effective* baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan atau mungkin lebih dari yang direncanakan, semakin besar *deviasi effective* perusahaan mengidentifikasi semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Budiman dan Setiyono (2012) serta Dewi dan Jati (2014) menemukan bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif pada tax avoidance. Paligrova (2010) menyatakan bahwa risiko perusahaan dapat diukur dengan cara menghitung standar deviasi dari EBITDA (Earning Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization) dibagi dengan total aset perusahaan.

Rumus standar deviasi yang dimaksud yaitu:

$$\text{RISK} = \sqrt{\frac{\sum_{T-1}^T (E - \frac{1}{T} \sum E)}{T-1}}$$

RISK = Risiko Perusahaan

E = EBITDA/Total Aset

T = Tahun

5. *International Operation* (IO)

Internatioanal Operation adalah aktifitas perusahaan diluar negeri atau kegiatan lintas Negara pada suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki *International Operation* biasanya disebut perusahaan multinatioanal. Perencanaan

pajak untuk suatu *International Operation* merupakan tool bagi perusahaan multinasional untuk melakukan *Tax Avoidance* (Permatasari, 2004). Dalam penelitian ini variable *International Operation* diukur dengan variable *dummy*, Jika perusahaan memiliki *International Operation* maka akan di beri nilai 1, tetapi jika tidak akan di beri nilai 0.

3.2.3 Variabel Kontrol

Variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak terpengaruh oleh faktor luar yang tidak teliti. Variabel kontrol sering digunakan sebagai pemanding melalui penelitian eksperimental. Variabel moderat yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Industry Type (IT)

Menurut Nurhayati (2005), klasifikasi resmi tipe industri dari BEI, yang terdiri dari sembilan industri, digolongkan menjadi *high profile industry* dan *low profile industry*. Tujuh industri yaitu pertanian, pertambangan, industri bahan dasar dan bahan kimia, industri kreatif, industri barang-barang konsumsi, properti dan realestate, dan infrastruktur, dan transportasi diklasifikasikan sebagai *high profile industry* sedangkan dua lainnya, keuangan dan perdagangan, jasa dan investasi, diklasifikasikan sebagai *low profile industry*.

Variabel ini di ukur menggunakan variabel *dummy* jika merupakan *high profile industry* = 1; dan jika termasuk *low profile industry* = 0.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa laporan tahunan lengkap (*annual report*) serta informasi-informasi seperti, KAP yang mengaudit perusahaan pada tahun tersebut, jumlah Komisaris Independen perusahaan, jumlah Komite Audit perusahaan dan informasi tentang apakah perusahaan memiliki cabang atau perwakilan perusahaan di luar negeri.

3.4. Metode Analisis data

3.4.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui tingkat Kualitas Audit (KAU), Proporsi Komisaris Independen (PKI), Komite Audit (KA), Resiko Perusahaan (RISK) dan *International Operation (IO)* serta *Industry Type (IT)* pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai *minimum*, *nilai maximum*, *mean*, dan standar deviasi (Kusumadilaga, 2010).

3.4.2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini (Kusumadilaga, 2010). Pengujian ini juga untuk memastikan nilai – nilai koefisien sebagai penduga yang

tidak bias (Sanusi, 2011). Nilai tersebut akan terpenuhi jika hasil uji asumsi klasiknya memenuhi asumsi normalitas, serta tidak terjadi heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas (Rahayu, 2010).

3.4.2.1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji apakah residual terdistribusi secara normal. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2006). Pengujian dilakukan menggunakan uji *Normal Probability Plot* terhadap residual. Dasar memenuhi keputusan teruji normalitas atau tidak dalam pengujian *Normal Probability Plot*, sebagai berikut (Ghozali, 2006):

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi normalitas.
2. Jika data yang menyebar jauh dari garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi normalitas.

3.4.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas, ketika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap. Pendeteksian gejala heteroskedastisitas diuji dengan melihat pola grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya

SRESID, dimana sumbu X yang telah diprediksi dan sumbu Y adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di *studentized*. Dasar memenuhi keputusan teruji heteroskedastisitas atau tidak dalam pengujian *Scatterplot*, sebagai berikut (Ghozali, 2006):

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik – titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik – titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.4.2.3. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinearitas antar variable independen (Ghozali 2006). Ukuran besarnya korelasi yang bebas multikolinearitas dapat di ukur melalui nilai tolerance atau VIF dari masing-masing variabel dalam program computer SPSS Ver. 20 yaitu nilai toleransi $< 0,1$ atau $VIF > 10$ maka hal ini mengindikasikan adanya multikolinearitas.

3.4.3. Regresi Berganda

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Berganda, Persamaan regresinya adalah (Ghozali 2006):

$$TXA = a + b_1KAU + b_2PKI + b_3KA + b_4RISK + b_5IO + b_6IT + e$$

Keterangan:

TXA	=	Tax Avoidance
KAU	=	Kualitas Audit
PKI	=	Propinsi Komisaris Independen
KA	=	Komite Audit
RISK	=	Resiko Perusahaan
IO	=	<i>International Operation</i>
IT	=	<i>Industry Type</i>
a	=	Konstanta
$b_1 - b_{12}$	=	Koefisien Regresi
e	=	error

Ghozali (2006) menjabarkan ketepatan fungsi regresi tersebut dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodness of fit*-nya, yang secara statistik dapat diukur dari koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik t.

3.4.4. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan ikhtisar yang menyatakan seberapa baik garis regresi mencocokkan data (Ghozali, 2006). Nilai R^2 berkisar antara 0-1. Persamaan regresi linier berganda semakin baik apabila nilai koefisien determinasi (R^2) semakin besar (mendekati 1) dan cenderung meningkat nilainya sejalan dengan

peningkatan jumlah variabel bebas (Sanusi, 2011). Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya, nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.4.5. Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji Statistik t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing – masing variabel independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen (Rahayu, 2010).

a. Merumuskan Hipotesis:

1) $H_0 : b_2 \leq 0$, tidak terdapat pengaruh signifikan negatif Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance.

$H_2 : b_2 > 0$, terdapat pengaruh signifikan negatif Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance.

2) $H_0 : b_3 \leq 0$, tidak terdapat pengaruh signifikan negatif Presentase Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance.

$H_3 : b_3 > 0$, terdapat pengaruh signifikan negatif Presentase Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance.

3) $H_0 : b_4 \leq 0$, tidak terdapat pengaruh signifikan negatif Jumlah Anggota Komite Audit terhadap Tax Avoidance.

$H_3 : b_4 > 0$, terdapat pengaruh signifikan negative Jumlah Anggota Komite Audit terhadap Tax Avoidance.

4) $H_0 : b_1 \leq 0$, tidak terdapat pengaruh signifikan positif Resiko Perusahaan terhadap Tax Avoidance.

$H_1 : b_1 > 0$, terdapat pengaruh signifikan positif Resiko Perusahaan terhadap Tax Avoidance.

5) $H_0 : b_5 \leq 0$, tidak terdapat pengaruh signifikan positif International *Operation* terhadap Tax Avoidance.

$H_3 : b_5 > 0$, terdapat pengaruh signifikan positif International *Operation* terhadap Tax Avoidance.

b. Kriteria Pengujian (Ghozali, 2006) :

1) Probabilitas \leq tingkat signifikansi (Sig \leq 0,05), maka H_0 ditolak, variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

2) Probabilitas $>$ tingkat signifikansi (Sig $>$ 0,05), maka H_0 diterima, variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh Kualitas Audit (KAU), Proporsi Komisaris Independen (PKI), Jumlah Anggota Komite Audit (KA), Resiko Perusahaan (RISK), *Intenentional Opration* (IO), dan *Industry Type* (IT) sebagai variabel control terhadap agresifitas perusahaan dalam melakukan *Tax Avoidance* yang diproksikan dengan *Cash Effective Tax Rate* (TXA).

Dari kriteria populasi yang telah ditentukan yaitu perusahaan yang listing pada Bursa Efek Indonesia (BEI) berturut-turut dari tahun 2014-2016 diperoleh sampel sebanyak 106 perusahaan. Metode yang digunakan dalam penentuan sampel dengan metode *purposive sampling* yaitu memilih sampel penelitian yang sesuai dengan berbagai kriteria penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, langkah awal yang dilakukan adalah mengklasifikasikan informasi-informasi dan angka-angka dalam *annual report* perusahaan-perusahaan sesuai informasi yang telah dipaparkan di bab sebelumnya.

4.1 Deskripsi Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Data Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai data yang telah diolah dengan mengukur nilai *minimum*, nilai *maximum*, *mean*, dan standar deviasi variabel-

variabel penelitian pada perusahaan sampel. Berikut hasil pengujian perusahaan sampel tahun 2016 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TXA	106	,0006	1,2158	,263990	,1835387
KAU	106	0	1	,42	,495
PKI	106	20,00%	100,00%	43,3681%	14,19931%
KA	106	2	5	3,12	,492
RISK	106	,0024	,8986	,160970	,1553176
IO	106	0	1	,56	,499
IT	106	0	1	,57	,498
Valid n (listwise)	106				

Keterangan= TXA: Cash Effective Tax Rate; KAU: Kualitas Audit; PKI: Proporsi Komisaris Independen; KA: Jumlah Anggota Komite Audit; RISK: Risiko Perusahaan; IO: International Operation; IT: Industry Type.

Dari hasil pengujian di atas di dapatkan hasil analisis sebagai berikut:

Variabel TXA diperoleh rentang nilai sebesar 0,0006 sampai 1,2158. Nilai total TXA terbesar pada perusahaan sample sebesar 1,2158. Sedangkan nilai total TXA terkecil pada perusahaan sampel sebesar 0,0006. Rata-rata nilai total TXA dari perusahaan sampel adalah sebesar 0,2639 dengan standar deviasinya 0,18353. Uraian tersebut dapat diartikan bahwa dari 106 data perusahaan yang diamati rata-rata tingkat pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan hanya sebesar 26%.

Variabel KAU diperoleh rentang nilai sebesar 0 sampai 1. Nilai total KAU terbesar pada perusahaan sample sebesar 1 Sedangkan nilai total KAU terkecil pada perusahaan sampel sebesar 0. Rata-rata nilai total KAU dari perusahaan sampel

adalah sebesar 0,42 dengan standar deviasinya 0,495. Dari 106 data yang diamati sebanyak 44 perusahaan menggunakan jasa KAP *The Big Four* (Price Waterhouse Cooper – PWC, Deloitte Touche Tohamatsu, KPMG, Ernst & Young – E&Y), sementara sebanyak 62 perusahaan sampel tidak menggunakan KAP *The Big Four*.

Variabel PKI diperoleh rentang nilai sebesar 20% sampai 100%. Nilai total PKI terbesar pada perusahaan sample sebesar 100%. Sedangkan nilai total PKI terkecil pada perusahaan sampel sebesar 20%. Rata-rata nilai total PKI dari perusahaan sampel adalah sebesar 43% dengan standar deviasinya 14%. Hasil uraian di atas menunjukkan bahwa masih ada perusahaan yang terpilih sebagai sampel yang belum memenuhi ketentuan dari BEI yaitu perusahaan harus memiliki minimal 30% dari jumlah komisaris adalah komisaris independen, yang ditunjukkan nilai minimum dari variabel PKI adalah 20%.

Variabel KA diperoleh rentang nilai sebesar 2 sampai 5. Nilai total KA terbesar pada perusahaan sample sebesar 5. Sedangkan nilai total KA terkecil pada perusahaan sampel sebesar 2. Rata-rata nilai total KA dari perusahaan sampel adalah sebesar 3,12 dengan standar deviasinya 0,492. Hal ini menunjukkan masih ada 1,9% dari perusahaan sampel yang belum mematuhi peraturan dari Bank Indonesia no.8/14/PBI/2006, yang mengatur bahwa perusahaan yang listing di BEI minimal mempunyai komite audit yang beranggotakan 3 orang.

Variabel RISK diperoleh rentang nilai sebesar 0,0024 sampai 0,8986. Nilai total RISK terbesar pada perusahaan sample sebesar 0,8996. Sedangkan nilai total RISK terkecil pada perusahaan sampel sebesar 0,0024. Rata-rata nilai total RISK dari

perusahaan sampel adalah sebesar 0,160 dengan standar deviasinya 0,155. Artinya penyebaran data atau penyimpangan datanya sebesar 0,155 terhadap nilai rata-ratanya. Dari data di atas dapat dilihat bahwa resiko yang timbul pada perusahaan sampel yang diakibatkan dari karakter eksekutif rata-rata sebesar 16%.

Variabel IO diperoleh rentang nilai sebesar 0 sampai 1. Nilai total IO terbesar pada perusahaan sample sebesar 1 Sedangkan nilai total IO terkecil pada perusahaan sampel sebesar 0. Rata-rata nilai total IO dari perusahaan sampel adalah sebesar 0,56 dengan standar deviasinya 0,499. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa perusahaan yang mempunyai *International Operation* atau perusahaan multinasional lebih berisiko melakukan tax avoidance sebesar 56% dari pada perusahaan non multinasional.

Variabel kontrol IT diperoleh rentang nilai sebesar 0 sampai 1. Nilai total IT terbesar pada perusahaan sample sebesar 1 Sedangkan nilai total IT terkecil pada perusahaan sampel sebesar 0. Rata-rata nilai total IT dari perusahaan sampel adalah sebesar 0,57 dengan standar deviasinya 0,498. Artinya penyebaran data atau penyimpangan datanya sebesar 0,498 terhadap nilai rata-ratanya.

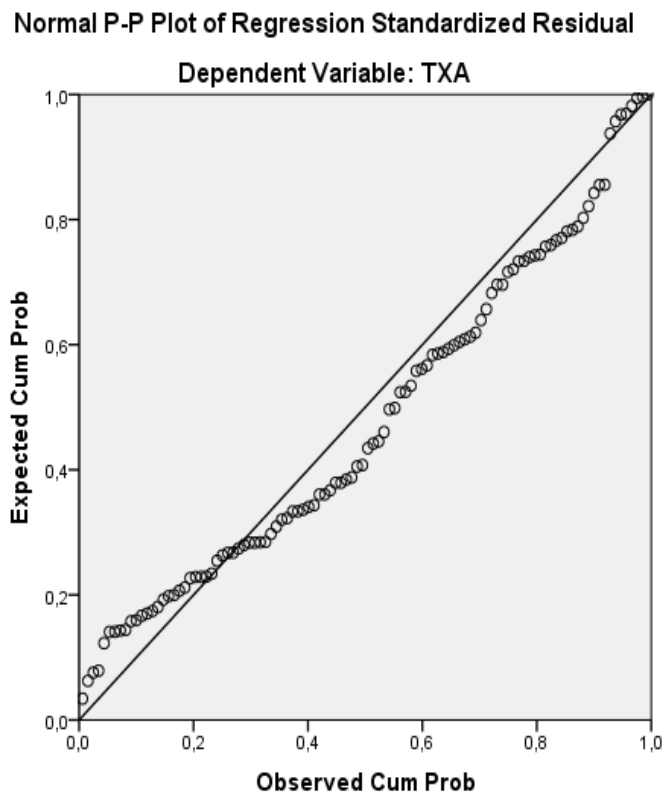
4.1.2 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen, variabel dependen, dan variabel kontrol terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2006). Pengujian dilakukan menggunakan uji *Normal*

Probability Plot terhadap residual. Dasar memenuhi keputusan teruji normalitas atau tidak dalam pengujian *Normal Probability Plot*, sebagai berikut (Ghozali, 2006):

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi normalitas.
2. Jika data yang menyebar jauh dari garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi normalitas.

Grafik 1. Uji Normalitas



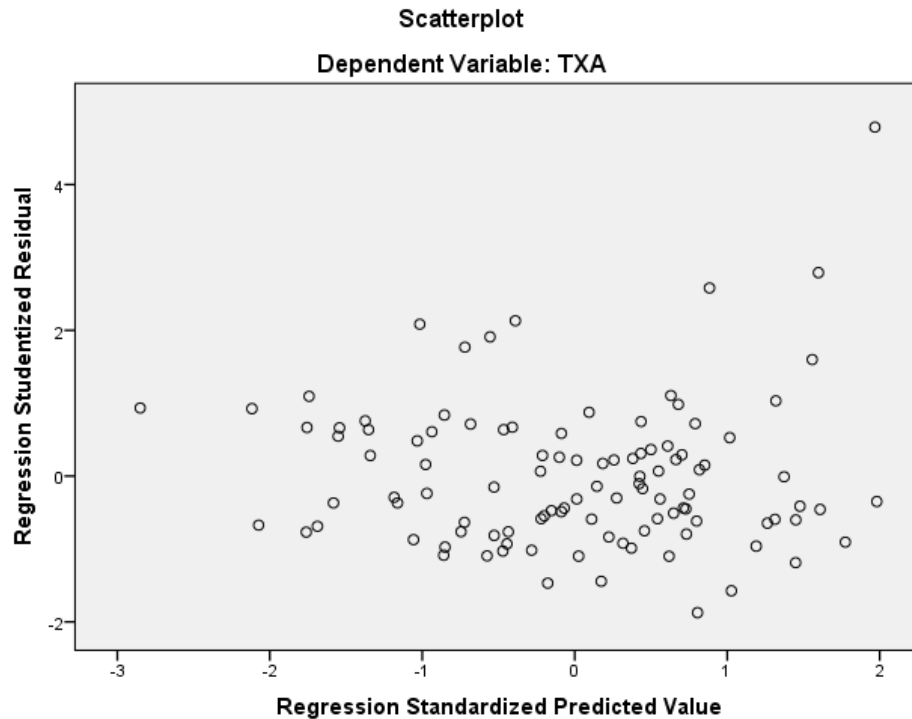
Hasil pengujian dengan uji *Normal Probability Plot* menunjukkan data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini berarti bahwa model regresi memenuhi normalitas.

4.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas, ketika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap. Pendeteksian gejala heteroskedastisitas diuji dengan melihat pola grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID, dimana sumbu X yang telah diprediksi dan sumbu Y adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di *studentized*. Dasar memenuhi keputusan teruji heteroskedastisitas atau tidak dalam pengujian *Scatterplot*, sebagai berikut (Ghozali, 2006):

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik – titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik – titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Grafik 2. Uji Heteroskedastisitas



Hasil pengujian dengan uji *scatterplot* menunjukkan tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.1.4 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinearitas antar variable independen (Ghozali 2006). Ukuran besarnya korelasi yang bebas multikolinearitas dapat di ukur melalui nilai tolerance atau VIF dari masing-masing variabel dalam program computer SPSS Ver. 20 yaitu

nilai toleransi lebih kecil dari 0,1 atau VIF lebih besar dari 10,0 maka hal ini mengindikasikan adanya multikolinearitas, tetapi jika nilai toleransi lebih besar dari 0,1 atau VIF lebih kecil dari 10,0 maka hal ini mengindikasikan tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
KAU	,923	1,084
PKI	,801	1,248
KA	,850	1,177
RISK	,950	1,052
IO	,957	1,045
IT	,878	1,139

a. Dependent Variable: TXA

Hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10,0, maka hal ini menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi.

4.1.5 Analisis Regresi Berganda

Berikut ini hasil dari analisis pengujian regresi berganda:

Table 5. Uji Analisis Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,281	,117		2,399	,018
KAU	,083	,035	,225	2,352	,021
PKI	-,001	,001	-,042	-,411	,682
KA	,013	,037	,035	,353	,725
RISK	-,271	,111	-,229	-2,432	,017
IO	-,077	,035	-,209	-2,224	,028
IT	,030	,036	,082	,840	,403

Keterangan= TXA: Cash Effective Tax Rate; KAU: Kualitas Audit; PKI: Proporsi Komisaris Independen; KA: Jumlah Anggota Komite Audit; RISK: Risiko Perusahaan; IO: International Operation; IT: Industry Type.

Berdasarkan pengujian *coefficients* diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{TXA} = 0,281 + 0,083 \text{ KAU} - 0,001 \text{ PKI} + 0,013 \text{ KA} - 0,271 \text{ RISK} - 0,077 \text{ IO} - 0,030 \text{ IT}$$

Persamaan diatas menunjukkan bahwa $a = 0,281$ artinya bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 0,281. Nilai b_1 variabel KAU sebesar 0,083 artinya bahwa setiap kenaikan 1 satuan KAU maka TXA akan meningkat sebesar 0,083 satuan dengan syarat nilai variabel yang lain konstan. Nilai

b_2 variabel PKI sebesar -0,001 artinya bahwa setiap kenaikan 1 satuan PKI maka TXA menurun sebesar 0,001 satuan dengan syarat nilai variabel yang lain konstan. Nilai b_3 KA sebesar 0,013 artinya bahwa setiap kenaikan 1 satuan KA maka TXA meningkat sebesar 0,013 satuan dengan syarat nilai variabel lain konstan. Nilai b_4 variabel RISK sebesar -0,271 artinya bahwa setiap kenaikan 1 satuan RISK maka TXA menurun sebesar 0,271 satuan dengan syarat nilai variabel lain konstan. Nilai b_5 variabel IO sebesar -0,077 artinya bahwa setiap kenaikan 1 satuan IO maka TXA menurun sebesar 0,077 satuan dengan syarat nilai variabel lain konstan. Nilai b_6 variabel IT sebesar -0,030 artinya bahwa setiap kenaikan 1 satuan IT maka TXA menurun sebesar 0,030 satuan dengan syarat nilai variabel lain konstan.

4.1.6 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan ikhtisar yang menyatakan seberapa baik garis regresi mencocokkan data (Ghozali, 2006). Nilai R^2 berkisar antara 0-1. Persamaan regresi linier berganda semakin baik apabila nilai koefisien determinasi (R^2) semakin besar (mendekati 1) dan cenderung meningkat nilainya sejalan dengan peningkatan jumlah variabel bebas. Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya, nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Table 6. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,504 ^a	,262	,211	,1643802

a. Predictors: (Constant), IT, KAU, IO, RISK, KA, PKI

b. Dependent Variable: TXA

Dari hasil pengujian di table 5 menunjukkan besarnya nilai adjusted R Square sebesar 0,211 yang berarti naik turunnya nilai cash effective tax rate 21,1% dipengaruhi oleh variabel-variabel independen pada penelitian ini, dan sebesar 78,9% dipengaruhi oleh variabel-variabel diluar penelitian ini.

4.1.7 Pengujian Hipotesis

4.1.7.1 Analisis Data Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen (Rahayu, 2010). Hasil uji signifikansi parameter individual dapat dilihat pada tabel 7. Berikut pembahasan dari hasil uji signifikansi parameter individual (uji t).

Tabel 7. Uji Pengaruh Individual

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,281	,117		2,399	,018
KAU	,083	,035	,225	2,352	,021
PKI	-,001	,001	-,042	-,411	,682
1 KA	,013	,037	,035	,353	,725
RISK	-,271	,111	-,229	-2,432	,017
IO	-,077	,035	-,209	-2,224	,028
IT	,030	,036	,082	,840	,403

Keterangan= TXA: Cash Effective Tax Rate; KAU: Kualitas Audit; PKI: Proporsi Komisaris Independen; KA: Jumlah Anggota Komite Audit; RISK: Risiko Perusahaan; IO: International Operation; IT: Industry Type.

1. Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Cash Effective Tax Rate*.

Hipotesis pertama menguji pengaruh kualitas audit terhadap cash effective tax rate. Dari hasil pengujian didapatkan hasil variabel kualitas audit memiliki nilai t hitung sebesar 2,352 dan nilai probabilitas sebesar 0.021, Hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas audit berpengaruh signifikan positif terhadap nilai CETR .

Hasil dari penelitian ini berhasil membuktikan bahwa kualitas audit berpengaruh secara positif signifikan terhadap CETR, hal ini mengindikasikan bahwa kualitas audit yang baik dapat menekan praktek *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini juga membuktikan bahwa semakin baik dan berkualitas audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik, maka akan semakin memperkecil kemungkinan manajemen melakukan tax avoidance. Karena semakin berkualitas

laporan audit, dapat menunjukkan seberapa detail dan telitinya proses-proses yang dilakukan selama audit berlangsung, sehingga menghasilkan laporan audit yang berkualitas. Hal ini berdampak pada sulitnya memanipulasi laporan keuangan perusahaan, sehingga manajemen akan kesulitan dalam melakukan praktek tax avoidance.

Selain hal tersebut di atas, setiap temuan dalam audit pasti diungkapkan dan dikomunikasikan oleh pihak auditor kepada semua pemangku kepentingan, sehingga temuan-temuan tersebut dapat ditindak lanjuti oleh pihak eksekutif dan pihak internal perusahaan untuk dibenahi supaya kedepannya menjadi lebih baik lagi. Selain itu informasi tersebut dapat dipakai sebagai dasar dalam mengambil keputusan berinvestasi oleh investor atau digunakan sebagai dasar untuk pertimbangan pencairan kredit bagi kreditur. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa prinsip transparansi dari *corporate governance* berjalan dengan baik dalam perusahaan tersebut.

Hasil penelitian ini sesuai dengan beberapa penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu penelitian dari: Sandy dan Lukviarman (2015), Maharani dan Suardana (2014), Dewi dan Jati (2014), Annisa dan Kurniasih (2012). Dimana penelitian-penelitian tersebut membuktikan secara empiris bahwa variabel kualitas audit berpengaruh signifikan dan positif terhadap *cash effective tax rate*, sebagai proksi dari *tax avoidance*.

2. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap *Cash Effective Tax Rate*.

Hipotesis kedua menguji pengaruh proporsi komisaris independen terhadap cash effective tax rate. Hasil pengujian menunjukkan variable proporsi komisaris independen memiliki nilai t hitung sebesar -0.411 dan nilai probabilitas sebesar 0.682. Hal ini menunjukkan bahwa variabel proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap CETR yang merupakan proksi dari *tax avoidance*.

Proporsi komisaris independen yang diukur dengan prosentase perbandingan antara komisaris independen dengan keseluruhan dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap CETR atau *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah komisaris independen tidak terlalu berpengaruh terhadap pengendalian *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Situasi ini dapat disebabkan oleh peran dan fungsi komisaris independen kurang optimal. Disamping itu penambahan komisaris independen dimungkinkan hanya karena perusahaan ingin mematuhi regulasi yang ada, sehingga berdampak pada fungsi *chek and balance* yang seharusnya dijalankan dengan baik oleh komisaris independen tidak maksimal. Kondisi ini mengakibatkan pengawasan terhadap eksekutif dan manajemen tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan beberapa hasil dari peneliti sebelumnya, yaitu penelitian dari: Hanum (2013), Meilinda (2013), Reza (2012). Dimana menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara proporsi komisaris independen dengan CETR sebagai proksi *tax avoidance*. Tetapi berlawanan dengan hasil penelitian dari Sandy dan Lukviarman (2015) serta Annisa dan

Kurniasih (2012) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap nilai CETR. Hal ini dapat disebabkan pada tahun tersebut kinerja dan tugas dari komisaris independen berjalan dengan baik dan sebagaimana seharusnya, sehingga fungsi check and balance pada perusahaan dapat berjalan dengan optimal.

3. Pengaruh Jumlah Anggota Komite Audit terhadap *Cash Effective Tax Rate*.

Hipotesis ketiga menguji pengaruh jumlah komite audit terhadap cash effective tax rate. Hasil pengujian menunjukkan variabel komite audit memiliki nilai t hitung sebesar 0.353 dan nilai probabilitas sebesar 0.725. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap CETR yang merupakan proksi dari *tax avoidance*.

Variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap CETR atau *tax avoidance* karena kinerja komite audit tidak berjalan dengan baik dan maksimal. Meskipun jumlah komite audit pada perusahaan telah sesuai dengan standar peraturan yang ditetapkan oleh BEI, yaitu komite audit paling sedikit berjumlah 3 orang, namun kemungkinan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki oleh komite-komite audit pada perusahaan sampel ini belum mencukupi. Hal ini mengakibatkan peran dan fungsi komite-komite audit pada perusahaan dalam pengawasan pelaporan keuangan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini tercermin dari perusahaan-perusahaan yang menjadi obyek penelitian ini, sebagian besar memiliki komite audit yang beranggotakan 3 orang, yang sesuai dengan peraturan BEI, tetapi tingkat rata-

rata tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sampel ini sebesar 84%. Di masa mendatang, sebaiknya seleksi untuk menentukan anggota komite audit dilakukan dengan lebih ketat dan mencari orang dengan kompetensi yang baik serta berpengalaman dalam bidangnya, sehingga peran dari komite audit guna melakukan pengawasan terhadap pelaporan keuangan dapat berjalan dengan optimal dan sebagaimana mestinya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya, yaitu penelitian dari: Swingly dan Sukartha (2015), Maharani dan Suardana (2014), Dewi dan Jati (2014), yang menjelaskan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara jumlah komite audit dan CETR sebagai proksi dari *tax avoidance*. Tetapi berlawanan dengan hasil penelitian dari Sandy dan Lukviarman (2015) serta Annisa dan Kurniasih (2012) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap nilai CETR. Hal ini dapat disebabkan pada tahun tersebut kinerja dan tugas serta kompetensi yang dimiliki oleh anggota komite audit berjalan dengan baik dan sebagaimana seharusnya, sehingga fungsi monitoring dan pengawasan pada perusahaan dapat berjalan dengan maksimal.

4. Pengaruh Resiko perusahaan terhadap *Cash Effective Tax Rate*.

Hipotesis keempat menguji pengaruh risiko perusahaan yang diproksikan dengan karakteristik eksekutif terhadap cash effective tax rate. Hasil pengujian menunjukkan variabel risiko perusahaan memiliki nilai t hitung sebesar -2.432 dan nilai probabilitas sebesar 0.017. Hal ini menunjukkan bahwa variabel risiko

perusahaan yang diproksikan dengan karakteristik eksekutif berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai CETR.

Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa dalam penerapan corporate governance selalu disertai dengan adanya risiko spekulatif seperti perusahaan yang mempunyai eksekutif yang bersifat pengambil risiko akan mempunyai risiko perusahaan yang lebih besar, sehingga kebijakan-kebijakan yang dimiliki perusahaan lebih memungkinkan terjadinya praktik *tax avoidance* pada perusahaan. Begitu pula sebaliknya perusahaan yang mempunyai eksekutif yang bersifat menghindari risiko akan cenderung membuat kebijakan-kebijakan yang aman, yang membuat risiko perusahaan menjadi cenderung lebih kecil. Hal ini tercermin dari tiga nilai CETR terendah dari perusahaan sampel masing-masing mempunyai nilai risiko perusahaan berturut-turut sebesar 49%, 33% dan 34%, yang mana dapat disimpulkan bahwa eksekutif dari perusahaan-perusahaan ini mempunyai sifat pengambil resiko. Dalam hasil penelitian ini juga dapat dilihat bahwa di Indonesia, eksekutif perusahaan masih sangat dominan dalam menentukan langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan perusahaan, termasuk dalam kebijakan-kebijakan dalam bidang perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa hasil penelitian terdahulu, yaitu penelitian dari Dyreng et al (2009), Budiman (2012), Nugroho (2011). Yang menyebutkan resiko perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai CETR yang berarti perusahaan melakukan *tax avoidance*.

5. Pengaruh *International Operation* terhadap Cash Effective Tax Rate.

Hipotesis kelima menguji pengaruh *international operation* terhadap cash effective tax rate. Hasil pengujian variabel *international operation* dengan *cash effective tax rate* memiliki nilai t hitung sebesar -2.224 dan nilai probabilitas sebesar 0.028. Hal ini menunjukkan bahwa *international operation* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap CETR yang merupakan proksi dari *tax avoidance*.

Penelitian ini menunjukkan perusahaan yang mempunyai *international operation* atau merupakan perusahaan multinasional mempunyai peluang melakukan *tax avoidance* lebih besar ketimbang perusahaan nasional, hal ini sejalan dengan teori risiko yang menyebutkan adanya risiko murni dan risiko spekulatif pada perusahaan multinasional atau perusahaan yang memiliki *international operation* (Djohanputro, 2008). Hal ini disebabkan perusahaan multinasional mempunyai lebih banyak variasi cara untuk memanipulasi laporan keuangan dan melakukan praktek-praktek *tax avoidance*, dari pada perusahaan non-multinasional/nasional.

Dari perusahaan sampel yang digunakan pada penelitian ini, hasil menunjukkan perusahaan yang diduga mempunyai tingkat *tax avoidance* yang tinggi rata-rata mempunyai subsidiary, parent company ataupun afiliasi di negara yang tergolong dalam *tax heaven country* diantaranya Hongkong, Amerika Serikat, Singapura dan Jerman (sumber: Tax Justice Network). Contohnya yaitu PT Pool Advista Indonesia yang memiliki subsidiary bernama Fujinomiya Nominees Ltd yang berkedudukan di Hongkong, PT Metropolitan Land yang mempunyai parent company bernama Reco Newton PTE LTD yang berkedudukan di Singapura, PT Lippo Securities yang

mempunyai afiliasi bernama Pacific Asia Holding Ltd yang berkedudukan di Hongkong dan beberapa perusahaan lainnya.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu, yaitu penelitian dari Permatasari (2004), Adeseye (2014), dan Lingga (2012). penelitian-penelitian tersebut membuktikan secara empiris bahwa variabel *international operation* berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *cash effective tax rate* yang merupakan proksi dari *tax avoidance*.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap 106 perusahaan sampel yang listing di BEI tahun 2016 dalam penelitian ini, maka dapat di simpulkan bahwa:

1. Variabel kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap CETR. Kualitas audit yang baik akan meningkatkan nilai CETR yang mengindikasikan adanya penekanan pada praktik *tax avoidance* oleh perusahaan.
2. Variabel proporsi komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap CETR. Semakin banyak komisaris independen belum dapat menaikkan nilai CETR, hal ini dimungkinkan terjadi karena komisaris independen yang diangkat oleh perusahaan belum menjalankan fungsinya dengan maksimal, dan perusahaan mengangkat komisaris independen tersebut hanya untuk mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku;
3. Variabel jumlah anggota komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap CETR. Komite audit tidak berpengaruh pada nilai CETR dimungkinkan karena kompetensi dan pengalaman anggota komite audit pada perusahaan belum mencukupi, sehingga peran komite audit kurang maksimal;

4. Variabel risiko perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap CETR. Perusahaan yang memiliki eksekutif yang bersifat pengambil risiko terbukti akan meningkatkan risiko perusahaan sehingga menurunkan nilai CETR yang mengindikasikan terjadinya praktik *tax avoidance* pada perusahaan semakin besar;
5. Variabel *international operation* berpengaruh negatif signifikan terhadap CETR. Semakin banyak *international operation* yang terjadi, terbukti akan menurunkan nilai CETR yang mengindikasikan terjadinya praktik *tax avoidance* pada perusahaan semakin besar;
6. Variabel *industry type* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap CETR. *Industry type* tidak berpengaruh pada nilai CETR karena di Indonesia perusahaan yang tergolong *high profil* maupun *low profil* sama-sama melakukan praktik-praktik *tax avoidance* guna mengoptimalkan keuntungan perusahaan.

Dari kesimpulan-kesimpulan di atas guna meningkatkan kesadaran terhadap pembayaran pajak sebaiknya untuk kedepannya regulator dalam hal ini pemerintah dapat mempertimbangkan variabel kualitas audit serta variabel risiko perusahaan dan *international operation* dalam membuat peraturan atau regulasi.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Adanya perusahaan yang tidak menampilkan nama KAP yang mengaudit perusahaan tersebut membuat peneliti harus mencari informasi lebih dalam tentang

perusahaan ini. Selain itu ketidak seragaman dalam menampilkan mata uang dalam annual report yang dilaporkan di BEI membuat sampel yang digunakan tidak bisa mencakup semua perusahaan yang listing di BEI.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis pembahasan dan kesimpulan, adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Menambahkan variabel lain dalam konsep *corporate governance* berupa kepemilikan institusional, insentif manajemen, kepemilikan keluarga dan faktor politik.
2. Penelitian selanjutnya dapat mengujikan model penelitian ini pada satu macam industri saja, jadi dapat memahami lebih dalam dan detail pada industri yang diteliti. Saran penulis untuk peneliti selanjutnya adalah menggunakan model ini untuk diaplikasikan pada industry jasa dan investasi atau keuangan dan perdagangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, N. A., dan L. Kurniasih. 2012. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*. 8 (2): 95-189.
- Anthony dan Govindarajan. 2002. Sistem Pengendalian Manajemen, Salemba Empat. Jakarta.
- Adeseye, M. A. 2014 Transfer Pricing: A Tax Avoidance Tool of Multinational Corporations. SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2463201> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2463201>. (diakses pada 1 maret 2017).
- Budiman, J., dan Setiyono. 2012. Pengaruh Karakteristik Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin.
- Butje, S., dan E. Tjondro. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Journa of Accounting*. 4 (2): 1-9.
- Coles, J., L. Daniel., D. Naveen., and L. Naveen. 2004. Managerial Incentives And Risk-Taking. *Journal of Financial Economics*, 79 (1): 431-468.
- Cooper, D. R., and P. S. Schindler. 2006. *Metode Riset Bisnis* (volume 2 edisi 9). PT. Media Global Edukasi. Jakarta.
- Daniri, M. A. 2006. Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia. Edisi kedua, Jakarta: PT. Ray Indonesia.
- Damayanti, F., dan T. Susanto. 2015. Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Resiko Perusahaan dan Return on Asset terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. 5 (2): 187-206.

- Darmawan, I. G. H., dan I. M. Sukartha. 2014. Pengaruh Penerapan Corporate Governace. Leverage, ROA, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi* 9 (1): 145-179.
- Desai, M. A., and D. Dharmapala. 2006. Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentive. *Journal of Financial Economics*. 79 (1): 145-179.
- Desai, M. A., and D. Dharmapala. 2009. Corporate Tax Avoidance and Firm Value. *The Review of Economics and Statistics*. 91 (3), 537-546.
- Dewi, G. A., dan M. M. Ratnasari. 2015. Pengaruh Insentif Eksekutif, Karakteristik Perusahaan dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 13 (1): 50-67.
- Dewi, G. A., dan I. K. Jati. 2014. Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi* 6 (2): 249-260.
- Djohanputro, B. 2008. E-Book Manajemen Risiko Korporat. Pendidikan dan Pembinaan Manajemen.
<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3769/Bab%202.pdf?sequence=7>. (diakses pada 2 november 2017).
- Dyrenge, S. D., H. Michelle and Maydew. 2010. The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance, *The Accounting Review*, 85 (1): 1163-1189.
- Egon. Z. 2000. Corporate Governance and the Role of the Board of Directors. *Journal International*. 36 (2): 233-256.
- Ghozali, I. 2006. *Ekonometrika Teori Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Griffin, and Jill. 2002. *Customer Loyalty*. Jakarta: Erlangga.

- Hanlon, H. S. 2010. "A Review of Tax Research". *Journal of Accounting and Economics*. 50 (1): 127-178.
- Hanum, H. R. 2013. Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Diponegoro Journal of Accounting*. 3 (2): 36-50.
- James, O. K., dan E. I. Igbeng. 2014. Corporate Governance, Shareholders wealth maximization and tax avoidance. *Research Journal of Finance and Accounting* 5 (2): 127-130.
- Kementrian BUMN, 2012. Keputusan sekretaris Kementrian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tentang indicator/parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.
- Khoala, A. 2013. Does Corporate Governance affect tax planning? Evidence from American companies, *International Journal of Advance Research* 1 (10): 864-873.
- Kurniasih, T., dan M. Sari. 2013. Pengaruh ROA, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi* 18 (1): 1-84.
- Kusumadilaga. 2010. Pengaruh CSR Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating. *E-Journal Universitas Diponegoro*. 1 (2): 34-37.
- Lingga, 2012. Aspek Perpajakan dalam *Transfer Pricing* dan Problematika Praktik Penghindatan Pajak (Tax Avoidance). *Zenit*. 1 (3): 23-27.
- Maharani, I. G., dan K. A. Suardana. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*. 9 (2): 525-539.

- Meilinda, M. 2013. Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*. 3 (2): 11-24
- Miinick, K., and T. Noga. 2010. Do Corporate Governance characteristics influence tax management?. *Journal of Corporate Finance*. 16 (5): 703-718.
- Muslich. 2007. Analisis Risiko Operasional pada PT Karisma Teknik Citeurep. *Risk Management Journal*. 11 (4): 48- 62.
- Nugroho, A. A. 2011. Pengaruh Hubungan Politik dan Reformasi Perpajakan Terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2008–2009. *Jurnal Akuntansi Universitas Indonesia*. 1 (2): 14-26.
- Nurhayati, R. 2005, “The Determinants of The Level of Natural Environmental Disclosures of JSX Listed Entities”. *Journal of the Asia Pacific Centre for Environmental Accountability*. 12 (3): 4-11.
- Paligorova, T. 2010. Corporate Risk Taking and Ownership Structure. *Bank of Canada Working Paper*. 3 (1): 3-5.
- Permana, A. R. dan Zulaikha. 2015. Pengaruh Corporate Goernance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI tahun 2011-2014). *Diponegoro Journal of Accounting*. 4 (4): 1-11
- Permatasari. 2004. Transfer Pricing Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak Bagi Perusahaan Multinasional. *Bina Ekonomi* 8 (1): 1-109.
- Pohan, H. T. 2008. Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, AkruaI Pilihan, Tarif Pajak dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*. 4 (2): 113-135.

- Prakosa, K. 2014. Pengaruh Good Corporate Governace terhadap penghindaran pajak di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Mataram.
- Rahayu, S. K. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal. Graha Ilmu. Bandung.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Reza, F. 2012. Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Indonesia*. 2 (3): 24-36.
- Rusidy. 2013. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Aggressive Tax Avoidance di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 4 (2): 165-329.
- Sabli, N., and R. M. Noor. 2012. Tax planning and Corporate Governance. *In The 3rd International Conference on Business and Economic Research (3rd ICBER 2012) Proceeding*. Bandung.
- Sanusi. 2011. Metode Penelitian Bisnis. Salemba Empat. Jakarta.
- Sandy, S., dan N, Lukviarman. 2015. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. 19 (2): 85-98.
- Sartori, N. 2010. Effect of Strategic Tax Behavior on Corporate Governance. www.ssrn.com. (diakses 17 Desember 2017).
- Setiana, D., dan W. Setyowati. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Kompensasi Rugi Fiskal, ROA, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Journal Accounting and Banking*. 3 (2): 2-4.

- Shafer, W., and R. Simons. 2006. Social responsibility, Machiavellianism and tax avoidance: A Study on Hongkong tax professionals. *Working Paper*. 5.
- Solomon, J. 2007. Corporate Governance and accountability. 2nd ed. The Atrium, West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd.
- Suandy, E. (2008). Hukum Pajak. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
- swa.co.id/tag/corporate-governance-perception-index-cgpi. (diakses 2 Oktober 2013).
- Swingly, C., dan Sukartha. 2015. Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 10 (1): 7-8.
- Tarjo. 2008. Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Institusional dan Leverage Terhadap Manajemen Laba, Nilai Pemegang Saham Serta Cost of Equity Capital. *Simposium Nasional Akuntansi XI*. Pontianak.
- Warsidi, dan B. A. Pramuka. 2009. Evaluasi Kegunaan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Perubahan Laba di Masa Yang Akan Datang. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi*. 2 (1): 1-22.

LAMPIRAN 1

Kode	Nama Perusahaan	TXA	KAU	PKI	KA	RISK	IO	IT
AGRO	PT BRI AGRO	0,27	1	50%	3	0,02	0	0
AHAP	PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA	0,32	0	50%	3	0,04	0	0
AISA	PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD	0,20	0	40%	4	0,15	1	1
AKPI	PT ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY	0,35	1	33%	3	0,04	1	1
AMAG	PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA	0,08	0	33%	3	0,06	1	0
AMFG	PT ASAHIMAS FLAT GLASS	0,34	0	33%	3	0,10	1	1
APIC	PT PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL	0,03	0	50%	3	0,06	0	0
APLI	PT ASIAPLAST INDUSTRIES	0,17	1	33%	3	0,17	0	1
APLN	PT AGUNG PODOMORO LAND	0,01	1	33%	3	0,06	1	1
ARNA	PT ARWANA CITRA MULIA	0,25	1	33%	4	0,12	0	1
ASBI	PT ASURANSI BINTANG	0,54	1	50%	3	0,06	0	0
ASDM	PT ASURANSI DAYIN MITRA	0,15	0	50%	3	0,17	0	0
ASGR	PT ASTRA GRAPHIA	0,25	0	50%	3	0,31	1	0
ASII	PT ASTRA INTERNATIONAL	0,24	1	33%	4	0,13	1	1
ASJT	PT ASURANSI JASA TANIA	0,30	0	67%	3	0,10	0	0
ASRI	PT ALAM SUTRA REALTY	0,35	0	40%	3	0,06	0	1
ASRM	PT ASURANSI RAMAYANA	0,18	0	50%	2	0,08	0	0
AUTO	PT ASTRA OTOPARTS	0,28	1	38%	3	0,06	1	1
BACA	PT BANK CAPITAL INDONESIA	0,26	0	67%	3	0,21	1	0
BAJA	PT SARANA CENTRAL BAJATAMA	0,12	0	33%	3	0,08	0	1
BATA	PT SEPATU BATA	0,42	1	50%	3	0,13	1	1
BBNI	PT BANK NEGARA INDONESIA	0,25	1	67%	3	0,04	0	0
BBNP	PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN	0,51	0	100%	3	0,00	1	0
BEST	PT BEKASI FAJAR INDUSTRI ESTATE	0,09	0	40%	3	0,10	1	1
BFIN	PT BFI FINANCE INDONESIA	0,18	0	50%	3	0,13	0	0
BJBR	PT BANK BJB	0,31	1	75%	5	0,02	0	0
BNBA	PT BANK BUMI ARTA	0,26	1	67%	3	0,02	0	0
BSIM	PT BANK SINARMAS	0,08	0	67%	3	0,22	1	0
BTPN	PT BTPN	0,30	1	60%	4	0,04	1	0
CASS	PT CARDING AERO SERVICE	0,34	0	20%	3	0,40	0	0
CEKA	PT WILMAR CAHAYA INDONESIA	0,25	1	33%	3	0,24	1	1
CMNP	PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA	0,21	0	50%	3	0,10	0	0
CPIN	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	0,14	1	50%	5	0,25	1	1
DEFI	PT DANASUPRA ERAPASIFIC	0,06	0	50%	3	0,24	0	0
DLTA	PT DELTA DJAKARTA	0,30	1	33%	3	0,42	1	0
DNET	PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL	0,02	0	43%	3	0,07	1	0
DUTI	PT DUTA PERTIWI	0,10	0	50%	3	0,13	1	1
DVLA	PT DARYA-VARIA LABORATORIA	0,19	1	43%	3	0,22	0	1
EKAD	PT EKADHARMA INTERNATIONAL	0,13	0	50%	3	0,26	1	1
ELSA	PT ELNUSA	0,36	1	40%	3	0,17	0	1
EMDE	PT MEGAPOLITAN DEVELOPMENT	0,28	0	40%	2	0,08	0	1
EMTK	PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI	0,38	1	38%	3	0,10	1	1

FAST	PT FAST FOOD INDONESIA	0,17	1	33%	3	0,14	1	0
GEMA	PT GEMA GRAHASARANA	0,77	0	33%	3	0,01	0	1
GGRM	PT GUDANG GARAM	0,27	0	50%	3	0,22	1	1
GMTD	PT GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT	0,07	0	33%	3	0,09	1	1
GPRA	PT PERDANA GAPURAPRIMA	0,34	0	25%	3	0,05	0	1
GSMF	PT EQUITY DEVELOPMENT INVESMENT	0,47	1	25%	4	0,05	1	0
GWSA	PT GREENWOOD SEJAHTERA	0,07	0	33%	3	0,05	1	1
HDFA	PT RADANA BHASKARA FINANCE	0,85	1	33%	3	0,01	0	0
HMSP	PT HM SAMPOERNA	0,29	1	33%	3	0,62	0	1
ICBP	PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	0,31	1	50%	3	0,19	1	1
ICON	PT ISLAND CONCEPT INDONESIA	1,22	1	33%	3	0,02	0	1
IGAR	PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA	0,21	0	33%	3	0,34	1	1
INAI	PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY	0,25	0	50%	3	0,07	0	1
INCI	PT INTANWIJAYA INTERNASIONAL	0,23	0	33%	3	0,08	0	1
INDF	PT INDOFOOD	0,36	1	38%	3	0,13	1	1
INDS	PT INDOSPRING	0,44	0	33%	3	0,04	0	1
INTD	PT INTER DELTA	0,37	0	33%	3	0,06	0	1
JECC	PT JEMBO CABLE COMPANY	0,22	0	67%	3	0,17	1	1
JPFA	PT JAPFA COMFEED INDONESIA	0,15	0	40%	3	0,22	1	1
JSPT	PT JAKARTA SETIABUDI INTERNASIONAL	0,64	1	60%	3	0,08	0	1
JTPE	PT JASUINDO TIGA PERKASA	0,23	0	50%	3	0,15	0	1
KAEF	PT KIMIA FARMA	0,19	0	20%	4	0,13	0	1
KBLI	PT KMI WIRE AND CABLE	0,16	1	40%	3	0,32	1	1
KDSI	PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL	0,12	0	50%	3	0,12	0	1
KLBF	PT KALBE FARMA	0,24	1	57%	3	0,31	0	1
KPIG	PT MNC LAND	0,04	0	40%	3	0,11	1	1
LMSH	PT LIONMESH PRIMA	0,10	0	33%	3	0,09	1	1
LPGI	PT LIPPO GENERAL INSURANCE	0,04	0	50%	3	0,06	1	0
LPKR	PT LIPPO KARAWACI	0,35	0	50%	3	0,05	1	1
LPPF	PT MATAHARI DEPARTEMENT STORE	0,24	1	33%	3	0,59	1	0
LPPS	PT LIPPO SECURITIES	0,04	0	33%	3	0,15	1	0
MAMI	PT MAS MURNI INDONESIA	0,02	0	75%	3	0,24	1	0
MAYA	PT BANK MAYAPADA	0,17	1	40%	3	0,03	1	0
MERK	PT MERCK	0,32	0	33%	3	0,45	1	1
MIDI	PT MIDI UTAMA INDONESIA	0,22	1	50%	3	0,20	0	0
MLBI	PT MULTI BINTANG INDONESIA	0,19	1	57%	3	0,90	1	0
MREI	PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA	0,08	0	33%	3	0,13	0	0
MTDL	PT METRODATA ELECTRONICS	0,43	1	33%	3	0,17	0	0
MTLA	PT METROPOLITAN LAND	0,00	1	33%	3	0,33	1	1
MYOR	PT MAYORA INDAH	0,29	0	40%	3	0,22	1	0
MYRX	PT HANSON INTERNATIONAL	0,35	1	33%	3	0,02	0	1
NISP	PT BANK OCBC NISP	0,33	0	43%	3	0,03	1	0
PEGE	PT PANCA GLOBAL SECURITIES	0,12	0	67%	3	0,11	1	0
PJAA	PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL	0,49	0	50%	4	0,10	0	1

PLIN	PT PLAZA INDONESIA REALTY	0,35	1	25%	3	0,18	1	1
PNBN	PT PANIN BANK	0,27	1	67%	4	0,03	1	0
POOL	PT POOL ADVISTA INDONESIA	0,00	0	33%	3	0,34	1	0
PUAD	PT PUDJIADI PRESTIGE	0,60	0	33%	3	0,08	1	1
PWON	PT PAKUWON JATI	0,21	1	33%	3	0,13	1	1
RAJA	PT RUKUN RAHARJA	0,33	0	50%	3	0,12	0	1
RALS	PT RAMAYANA LESTARI SENTOSA	0,08	1	40%	3	0,15	0	0
RDTX	PT RODA VIVATEX	0,00	0	33%	2	0,49	1	1
RELI	PT RELIENCE SECURITIES	0,14	0	50%	3	0,05	0	0
RODA	PT PIKKO LAND DEVELOPMENT	0,17	0	25%	3	0,03	1	1
SCBD	PT DANAYASA ARTHATAMA	0,51	0	33%	3	0,06	1	0
SCCO	PT SUCADO	0,36	0	33%	3	0,28	0	1
SCMA	PT SURYA CITRA MEDIA	0,26	1	20%	3	0,65	0	1
SDMU	PT SIDOMULYO SELARAS	0,54	0	33%	3	0,01	1	0
SDRA	PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA	0,32	1	75%	5	0,03	1	0
SMGR	PT SEMEN INDONESIA	0,30	1	33%	3	0,16	0	1
TRIS	PT TRISULA INTERNATIONAL	0,42	0	33%	3	0,12	0	0
ULTJ	PT ULTRA JAYA	0,27	0	33%	3	0,34	1	1
UNTR	PT UNITED TRACTORS	0,30	1	33%	3	0,16	1	0
UNVR	PT UNILEVER INDONESIA	0,24	0	80%	5	0,55	1	1

LAMPIRAN 2

1. Descriptive Statistics

	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TXA	106	,0006	1,2158	,263990	,1835387
KAU	106	0	1	,42	,495
PKI	106	20,00%	100,00%	43,3681%	14,19931%
KA	106	2	5	3,12	,492
RISK	106	,0024	,8986	,160970	,1553176
IO	106	0	1	,56	,499
IT	106	0	1	,57	,498
Valid n (listwise)	106				

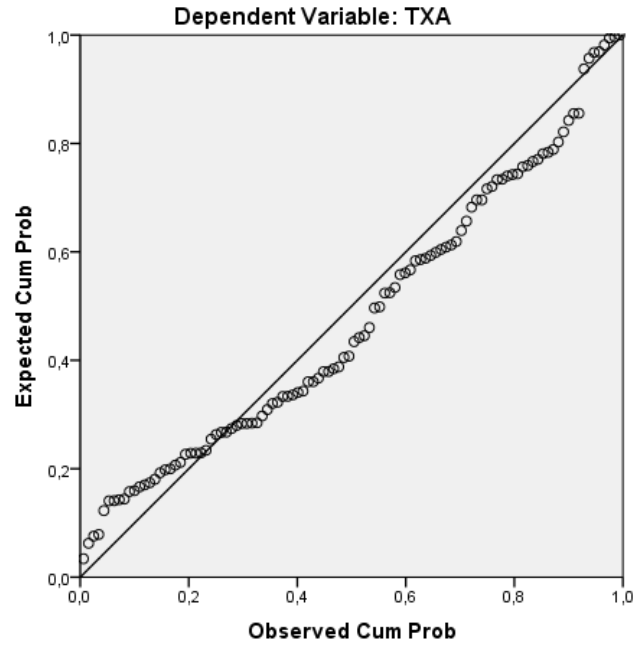
2. Correlations

		TXA	KAU	PKI	KA	RISK	IO	IT
Pearson Correlation	TXA	1,000	,215	-,060	,057	-,231	-,246	,075
	KAU	,215	1,000	-,052	,219	,104	-,019	,004
	PKI	-,060	-,052	1,000	,274	-,083	,034	-,334
	KA	,057	,219	,274	1,000	-,035	,107	-,014
	RISK	-,231	,104	-,083	-,035	1,000	,160	,076
	IO	-,246	-,019	,034	,107	,160	1,000	,023
	IT	,075	,004	-,334	-,014	,076	,023	1,000
		TXA	.	,013	,271	,280	,009	,006
Sig. (1-tailed)	KAU	,013	.	,297	,012	,145	,424	,485
	PKI	,271	,297	.	,002	,199	,366	,000
	KA	,280	,012	,002	.	,362	,137	,444
	RISK	,009	,145	,199	,362	.	,051	,220
	IO	,006	,424	,366	,137	,051	.	,407
	IT	,224	,485	,000	,444	,220	,407	.
		TXA	106	106	106	106	106	106
N	KAU	106	106	106	106	106	106	106
	PKI	106	106	106	106	106	106	106
	KA	106	106	106	106	106	106	106
	RISK	106	106	106	106	106	106	106
	IO	106	106	106	106	106	106	106
	IT	106	106	106	106	106	106	106
		IT	106	106	106	106	106	106

LAMPIRAN 3

3.

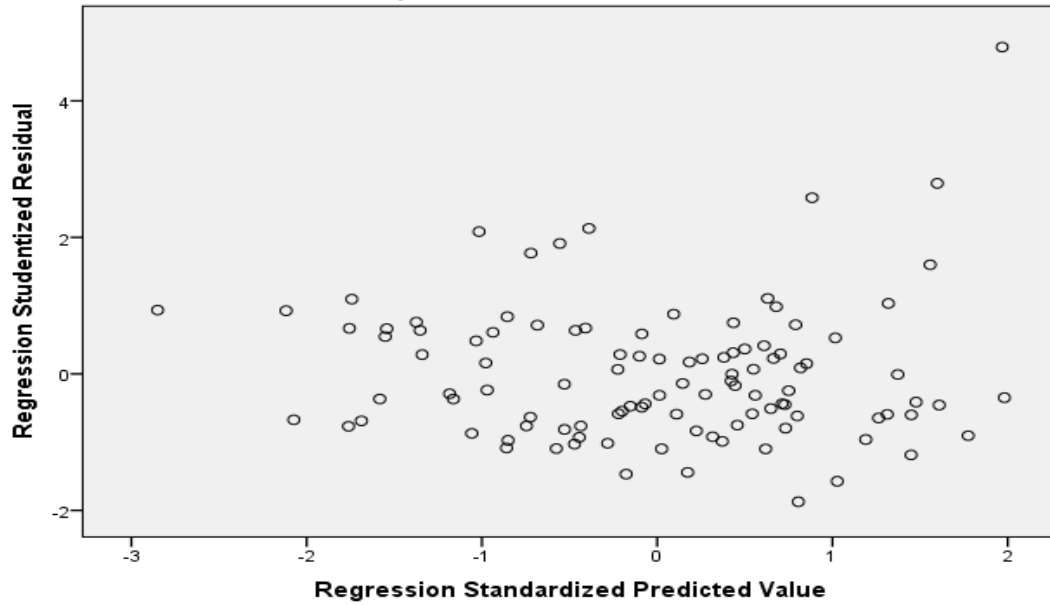
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



4.

Scatterplot

Dependent Variable: TXA



LAMPIRAN 4

5. Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 KAU	,923	1,084
PKI	,801	1,248
KA	,850	1,177
RISK	,950	1,052
IO	,957	1,045
IT	,878	1,139

a. Dependent Variable: TXA

6. Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,281	,117		2,399	,018
KAU	,083	,035	,225	2,352	,021
PKI	-,001	,001	-,042	-,411	,682
KA	,013	,037	,035	,353	,725
RISK	-,271	,111	-,229	-2,432	,017
IO	-,077	,035	-,209	-2,224	,028
IT	,030	,036	,082	,840	,403

a. Dependent Variable: TXA

7. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,504 ^a	,262	,211	,1643802

a. Predictors: (Constant), IT, KAU, IO, RISK, KA, PKI

b. Dependent Variable: TXA